

**IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAKYAT
DI PROVINSI LAMPUNG MELALUI PENDEKATAN
*STREET-LEVEL BUREAUCRACY***

(Skripsi)

**Oleh
Alya Septiani
NPM 2216041113**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAKYAT DI PROVINSI LAMPUNG MELALUI PENDEKATAN *STREET-LEVEL BUREAUCRACY*

Oleh

ALYA SEPTIANI

Penelitian ini menganalisis implementasi Program Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 32 Lampung Selatan, sebuah kebijakan afirmatif berbasis asrama (*boarding school*) yang dirancang pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrem. Masalah utama penelitian berakar pada adanya kesenjangan (*implementation gap*) ketika regulasi kaku terpusat dihadapkan pada kerentanan psikososial siswa kelompok prasejahtera di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur bersama kepala sekolah, dewan guru, dan wali asrama selaku aktor pelaksana, serta diperkuat oleh observasi langsung dan studi dokumentasi. Pisau analisis utama yang digunakan dalam riset ini adalah teori *Street-Level Bureaucracy* dari Michael Lipsky yang disintesiskan dengan konsep *Total Institution* dari Erving Goffman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SRMA 32 Lampung Selatan secara sosiologis beroperasi sebagai institusi total yang menerapkan kontrol perilaku, ruang, dan waktu yang sangat ketat (*batch living*). Kondisi yang rigid ini memicu hambatan psikososial berupa homesick akut dan resistensi informal (*underlife*) pada diri siswa pada fase awal operasional. Guna mengamankan target kinerja dan menjaga stabilitas lingkungan, birokrat garis depan (*street-level bureaucrats*) secara aktif menggunakan otonomi relatif mereka untuk menerapkan diskresi adaptif, seperti modifikasi pembatasan gawai, fleksibilitas jadwal kunjungan orang tua, serta optimalisasi peran Wali Asrama yang melampaui fungsi pengawasan formal menjadi pendamping emosional siswa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Program Sekolah Rakyat sangat ditentukan oleh kapasitas aktor tapak dalam menegosiasikan aturan *top-down* dengan realitas kemanusiaan klien guna menjembatani dinamika *policy on paper menjadi policy in practice*.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Sekolah Rakyat, Birokrasi Tingkat Jalanan, Diskresi Adaptif, Institusi Total.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAKYAT DI PROVINSI LAMPUNG MELALUI PENDEKATAN *STREET-LEVEL BUREAUCRACY*

Oleh

ALYA SEPTIANI

This study analyzes the implementation of the People's School Program (Program Sekolah Rakyat) at SRMA 32 South Lampung, an affirmative boarding-school policy designed by the government to eradicate extreme poverty. The primary issue stems from an implementation gap when rigid centralized regulations confront the psychosocial vulnerabilities of underprivileged students on the ground. This study utilizes a qualitative approach with a descriptive single-case study design. Data were gathered through semi-structured interviews with the school principal, teaching staff, and dormitory wardens as implementation actors, further strengthened by direct observation and document analysis. The primary analytical framework uses Michael Lipsky's Street-Level Bureaucracy theory synthesized with Erving Goffman's Total Institution concept. The results indicate that SRMA 32 South Lampung sociologically operates as a total institution, enforcing strict behavioral, spatial, and time controls (batch living). This rigid environment triggers psychosocial shocks such as acute homesickness and informal resistance (underlife) among students during the early operational phase. To secure performance targets and maintain operational stability, front-line bureaucrats actively exercise their relative autonomy through adaptive discretion, including modifying gadget restrictions, adjusting flexible parental visit schedules, and optimizing the role of Dormitory Wardens to extend beyond formal oversight into personal and emotional guidance. This study concludes that the successful implementation of the People's School Program heavily relies on the capacity of street-level actors to negotiate top-down regulations with the grassroots realities of their clients, bridging the dynamic between policy on paper and policy in practice.

Keywords: Policy Implementation, People's School Program, Street-Level Bureaucracy, Adaptive Discretion, Total Institution.

**IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAKYAT
DI PROVINSI LAMPUNG MELALUI PENDEKATAN
*STREET-LEVEL BUREAUCRACY***

ALYA SEPTIANI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH
RAKYAT DI PROVINSI LAMPUNG MELALUI
PENDEKATAN STREET-LEVEL BUREAUCRAY**

Nama Mahasiswa : Alya Septiani

Nomor Pokok Mahasiswa : 2216041113

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



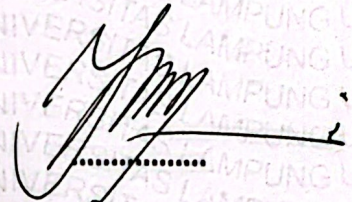
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.
NIP. 197009142006042001

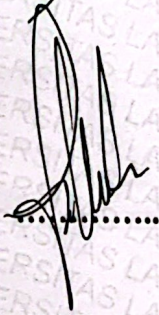
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Fery Triatmojo, S.A.N., M.PA.**



Penguji : **Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustiana Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 18 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Alya Septiani

NPM. 2216041113

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Alya Septiani, dilahirkan di Puralaksana pada tanggal 22 September 2004. Ia merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Yusup dan Ibu Haeni. Penulis memiliki dua orang kakak laki-laki yang bernama Rifaldi dan Yopi Apandi. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Way Suluh, Pekon Cangu, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat.

Perjalanan pendidikan formal penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Kota Besi yang diselesaikan pada tahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan studi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Sumberjaya dan lulus pada tahun 2019. Jenjang pendidikan menengah atas kemudian ditempuh di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Batubrak hingga dinyatakan lulus pada tahun 2022.

Ketertarikan penulis terhadap tata kelola publik membawanya melanjutkan pendidikan tinggi di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis berhasil menembus persaingan masuk perguruan tinggi melalui jalur seleksi UTBK (SBMPTN) pada tahun 2022. Meskipun tumbuh di lingkungan daerah yang secara umum masih kurang mengedepankan pentingnya pendidikan tinggi, hal tersebut tidak mematahkan semangat penulis untuk terus berkembang. Hal ini tidak terlepas dari peran keluarga yang sangat suportif dan senantiasa memberikan dukungan moral maupun materiil dalam setiap langkah perjalanan akademik penulis.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengembangkan kapasitas diri melalui organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai anggota Bidang SDO. Selain aktif berorganisasi, penulis juga memperkaya pengalaman melalui berbagai kegiatan lapangan. Pada Juni 2023, penulis terlibat

aktif melakukan kegiatan sukarelawan dalam program *Local Project Widyawiyata* yang diselenggarakan oleh AIESEC selama satu bulan. Pengalaman ini menjadi salah satu momen yang paling berkesan bagi penulis dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Selanjutnya, pada periode Januari hingga Februari 2025, penulis melaksanakan kewajiban akademik Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Heran, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Pengalaman profesional penulis kemudian dipertajam melalui Program Magang MBKM FISIP Unila yang dilaksanakan di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung pada periode Februari hingga Mei 2025. Seluruh rangkaian pengalaman akademik dan organisasi tersebut telah membentuk kompetensi penulis hingga akhirnya berhasil menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat kelulusan program sarjana.

MOTTO

“Gantungkan Cita-Citamu Setinggi Langit,. Bermimpilah Setinggi Langit. Jika
Engkau Jatuh, engkau akan Jatuh di Antara Bintang-Bintang”

(Soekarno)

“Sometimes You Will Never Know The Value Of The Moment Until It Becomes A
Memory”

(Dr. Seuss)

“Just Remember Even A Bad Day Is Just 24 Hours”

(Alya Septiani)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan hidayah-Nya. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, saya persembahkan karya tulis ini, untuk orang-orang yang saya cintai dan sayangi

Kedua Orang Tua Ku Tercinta

Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, serta perjuangan yang begitu besar demi keberhasilanku. Karya ini kupersembahkan sebagai wujud rasa hormat, cinta, dan terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan.

Kedua Saudaraku Tersayang

Terima kasih telah menjadi pelindung, pemberi semangat, dan saudara yang selalu ada dalam setiap tahap perjalanan hidup saya hingga titik ini.

Kakak ipar serta kedua ponakan Terkasih

Terima kasih telah memberikan warna, kebahagiaan, dan dukungan moral yang luar biasa. Semoga dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk terus meraih cita-cita di masa depan.

Para Dosen dan Civitas Akademika

Dengan kerendahan hati, karya ini saya persembahkan kepada para dosen dan seluruh civitas akademika yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya hingga hari ini.

Serta

Almamater Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung Melalui Pendekatan Street-Level Bureaucracy”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, doa, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Fery Triatmojo, S.A.N., M.PA. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta dengan penuh kesabaran memberikan arahan, masukan, dan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dodi Faedulloh, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat berarti guna penyempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, perhatian, serta motivasi kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
4. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, M.Si., S.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta pembelajaran yang sangat berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf dan civitas akademika Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama proses administrasi dan perkuliahan.

8. Seluruh pihak di SRMA 32 Lampung Selatan yang telah membantu penulis selama proses penelitian serta memberikan pengalaman dan informasi yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Yusup dan Mamah Haeni. Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, perjuangan, pengorbanan, serta dukungan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Terima kasih telah menjadi tempat pulang terbaik dan sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis.
10. Kepada kakak tercinta Rifaldi dan Yopi Apandi, serta ipar tersayang Mimin Siti Fatimah, terima kasih atas dukungan, perhatian, nasihat, serta kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.
11. Kepada kedua keponakan tersayang, Key Alvary Yahya dan Kyo Alvary Musa, terima kasih telah menjadi sumber kebahagiaan kecil dengan tingkah lucu dan keceriaan kalian yang selalu mampu menghibur penulis di tengah proses penyusunan skripsi ini.
12. Kepada sahabat seperjuangan penulis, Nurmakia Hepi, Apriyana Borusimbolon, Aprili Friska Dika Lesmana, dan Putri Novianti, yang dipertemukan sejak masa awal perkuliahan melalui ketidaksengajaan yang kemudian tumbuh menjadi cerita persahabatan yang penuh warna. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, dan cerita yang telah dilalui bersama hingga saat ini.
13. Kepada Ratih Apriyani, Marwati dan Mila Diana Saudara serta sahabat sejak kecil hingga sekarang. Terima kasih telah tumbuh bersama, saling menguatkan, dan tetap hadir dalam setiap proses kehidupan penulis.
14. Kepada keluarga kecil Kamar 202, yaitu Teh Titin Supartini, Aprela Kurnia Sari, Teh Triya Rohani, dan Ngah Selvia Amara Putri, yang telah menemani penulis selama berada di asrama. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, serta kenangan yang tidak akan terlupakan selama masa perkuliahan.
15. Kepada Iqlima Salsabila dan Safira Nazarani, teman magang penulis yang telah memberikan semangat, bantuan, serta pengalaman berharga selama menjalani kegiatan magang, serta kepada M. Ismal Sya'bandi selaku Partner Divisi Acara, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dalam melewati berbagai lika-liku di Himagara serta atas dukungan dan pendampingannya selama penulis melakukan penelitian.
16. Kepada teman-teman KKN Tanjung Heran yang telah menjadi bagian dari perjalanan dan cerita selama masa pengabdian.

17. Kepada teman-teman Ampatra yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
18. Terakhir, kepada diri penulis sendiri. Terima kasih telah mampu bertahan sejauh ini, melewati rasa lelah, takut, ragu, dan berbagai proses yang tidak mudah. Terima kasih karena tidak menyerah dan tetap memilih berjalan sampai di titik ini. Skripsi ini menjadi salah satu bukti bahwa segala usaha dan perjuangan tidak pernah sia-sia.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 11 Mei 2026

Penulis,

Alya Septiani

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
I . PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
II . TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	13
2.2.1 Model Implementasi Kebijakan	13
2.2.2 Faktor yang Memengaruhi Implementasi	15
2.3 Teori <i>Street-Level Bureaucracy</i>	16
2.3.1 Tata Kelola Pendisiplinan (<i>Disciplinary Governance</i>) dan Kontrol Klien	24
2.4 Konsep Institusi Total (<i>Total Institution</i>)	26
2.5 Sintesis Teori dalam Konteks Sekolah Berasrama.....	28
2.6 Program Sekolah Rakyat.....	31
2.6.1 Landasan Hukum dan Regulasi	32
2.6.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	33
2.6.3 Karakteristik dan Model Pengembangan Sekolah Rakyat.....	34
2.6.4 Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Rakyat.....	36
2.6.5 Alur Pelaksanaan dan Seleksi Siswa.....	37
2.6.6 Komponen Program	39
2.7 Implementasi Program Sekolah Rakyat	41
2.7.1 Aktor dan Peran dalam Implementasi Program Sekolah Rakyat.....	41
2.8 Kerangka Berpikir.....	43
III . METODE PENELITIAN	46

3.1 Metode Penelitian	46
3.2 Fokus Penelitian.....	47
3.3 Lokasi Penelitian.....	47
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data	49
3.6 Teknik Analisis Data	53
3.7 Uji Keabsahan Data	54
IV . HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Gambaran Umum Program Sekolah Rakyat.....	57
4.2 Gambaran Umum Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 32 Lampung Selatan	65
4.3 Hasil Penelitian	69
4.3.1 Regulasi.....	70
4.3.2 Tekanan Politik	77
4.3.3 Keyakinan Pribadi.....	81
4.3.4 Kebutuhan Intervensi	88
4.3.5 Rutinitas Kerja	94
4.3.6 Keinginan untuk Menghindari Konflik.....	101
4.3.7 Dinamika dengan Rekan Kerja	105
4.3.8 Sumber Daya.....	115
4.4 Pembahasan.....	126
4.4.1 Dilema Regulasi dan Kondisi Psikologis Siswa	126
4.4.2 Respon Pelaksana terhadap Tekanan Kebijakan.....	130
4.4.3 Dilema Disiplin dan Pendekatan Pembinaan.....	132
4.4.4 Diskresi dalam Penentuan Sasaran dan Prioritas.....	135
4.4.5 Adaptasi Sumber Daya melalui Rutinitas Kolektif.....	138
4.4.6 Diskresi dalam Penegakan Disiplin Siswa.....	140
V . PENUTUP	147
5.1 KESIMPULAN	147
5.2 SARAN	148
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	150
DAFTAR PUSTAKA.....	152
LAMPIRAN.....	158

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Presentase Angka Putus Sekolah (APS) Provinsi Lampung (2023)	2
2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Lampung (2020-2024).....	3
3. Penelitian Terdahulu.....	10
4. Definisi Analitis (DA) dan Definisi Operasional (DO) Variabel Penelitian	23
5. Matriks Sintesis Teori dalam Implementasi Program Sekolah Rakyat.....	30
6. Perbedaan Sekolah Rakyat dan Sekolah Umum	35
7. Model Pembangunan Sekolah Rakyat	35
8. Standar Minimal Sarana dan Prasarana Sekolah Rakyat	36
9. Kriteria Seleksi Peserta Didik Sekolah Rakyat.....	38
10. Tahapan Seleksi Peserta Didik.....	39
11. Dokumentasi Penelitian	52
12. Landasan Hukum Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.....	59
13. Matriks Sintesis Analisis Keyakinan Pribadi	87
14. Dimensi Kebutuhan Intervensi Siswa SRMA 32 Lampung Selatan	90
15. Matriks Urgensi Kebutuhan Intervensi	92
16. Pola Rutinitas Harian Siswa SRMA 32	98
17. Sistem Piket Siswa di Asrama.....	98
18. Sistem Kegiatan Kultum Siswa	99
19. Pola Beban Kerja Implementer.....	99
20. Pembagian Peran Utama Aktor Implementasi di SRMA 32 Lampung Selatan	112
21. Ringkasan Pola Kerja dan Jam Kerja yang Memengaruhi Koordinasi.....	113
22. Kondisi Sumber Daya SRMA 32 Lampung Selatan.....	124
23. Pemetaan Diskresi Pelaksana dalam Implementasi Program Sekolah Rakyat (PSR)	127
24. Ringkasan Analisis Diskresi dalam Penentuan Sasaran Program Sekolah Rakyat	137
25. Tabel Pemetaan Diskresi Pelaksana SRMA 32 Lampung Selatan	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Model Street Level Bureaucracy (Lipsky 2010)	20
2. Kerangka Berpikir	44
3. Struktur Organisasi Guru dan Tenaga Kependidikan SRMA 32 Lampung Selatan	68
4. Sintesis Temuan Model Kebutuhan Intervensi (SRMA 32 Lampung Selatan).....	93

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan elemen kunci dalam pembangunan nasional karena berperan sebagai sarana utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong mobilitas sosial (Sanga & Wangdra, 2023). Namun, capaian pendidikan yang adil dan merata masih menjadi tantangan besar, terutama ketika dikaitkan dengan persoalan kemiskinan yang bersifat struktural dan berdampak langsung terhadap kesetaraan kesempatan belajar (Anwar, 2022).

Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan. berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami tren penurunan. Pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 25,22 juta orang atau sekitar 9,03% dari total populasi. Angka ini kembali menurun pada September 2024 menjadi 8,57%. Namun, pada Maret 2025, BPS mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 23,85 juta jiwa, setara dengan 8,47% dari total populasi nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga ketimpangan sosial yang menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya membatasi akses terhadap pendidikan, tetapi juga mengurangi efektivitas pendidikan sebagai sarana strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi (menpan.go.id, 2025).

Pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan afirmatif untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin, seperti program wajib belajar 12 tahun, Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta kebijakan zonasi PPDB yang bertujuan menciptakan pemerataan kualitas pendidikan. Meskipun demikian, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau kelompok masyarakat miskin ekstrem yang tinggal di daerah tertinggal dan terpencil. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah untuk merancang program pendidikan yang lebih terarah dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat miskin. Permasalahan ketimpangan pendidikan juga terlihat jelas di daerah, salah satunya di Provinsi Lampung yang menempati peringkat ke-35 dari 38 provinsi di Indonesia dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi (Marly & Atika, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama masih terjadi pada jenjang pendidikan lanjut. Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain putus sekolah akibat perubahan kondisi sosial-ekonomi, termasuk dampak perubahan iklim terhadap mata pencaharian keluarga, serta persepsi kelompok masyarakat yang masih memberikan prioritas yang lebih besar terhadap pendidikan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi pendidikan di Lampung, Tabel 1 menyajikan data Angka Putus Sekolah (APS) berdasarkan jenjang pendidikan di Provinsi Lampung.

Tabel 1. Presentase Angka Putus Sekolah (APS) Provinsi Lampung (2023).

Kategori	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat
Berdasarkan Jenis Kelamin			
Laki-laki	0,10%	1,35%	1,25%
Perempuan	0,12%	0,59%	0,81%
Berdasarkan Lokasi			
Perkotaan	0,05%	0,78%	1,17%
Perdesaan	0,19%	1,25%	0,94%
Total	0,11%	0,98%	1,03%

Sumber: RRI.co.id (2025)

Data pada Tabel 1 mengindikasikan bahwa fenomena putus sekolah masih terjadi pada seluruh jenjang pendidikan, dengan disparitas yang cukup jelas antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada jenjang SD dan SMP, angka putus sekolah di perdesaan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan di perkotaan. Selain itu, angka putus sekolah anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan anak perempuan pada jenjang SMP dan SMA. Pola ini mengindikasikan bahwa kelompok anak dari keluarga miskin dan rentan, khususnya yang tinggal di wilayah perdesaan, memiliki risiko putus sekolah yang lebih besar. Temuan tersebut sejalan dengan urgensi Program Sekolah Rakyat yang memang dirancang untuk memastikan keberlanjutan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin ekstrem.

Selain data putus sekolah, tingkat partisipasi sekolah juga menjadi indikator penting untuk menilai keterjangkauan pendidikan di Lampung. Tabel 2 berikut menyajikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) berdasarkan kelompok usia selama periode 2020–2024.

Tabel 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Lampung (2020-2024).

Kelompok Usia (Tahun)	2020	2021	2022	2023	2024
07-12	99,74%	99,53%	99,56%	99,61%	99,42%
13-15	95,24%	95,58%	95,63%	95,93%	97,77%
16-18	71,34%	71,72%	71,14%	71,74%	81,55%
19-23	22,96%	23,05%	22,37%	23,51%	34,81%

Sumber: Satu Data Lampung

Tabel 2 memperlihatkan bahwa APS untuk kelompok usia 07–12 tahun dan 13–15 tahun sudah mendekati universal, dengan angka di atas 95 persen pada seluruh periode pengamatan. Namun, APS kelompok usia 16–18 tahun baru mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024, sedangkan APS kelompok usia 19–23 tahun masih relatif rendah meskipun menunjukkan tren mengalami kenaikan secara konsisten dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan dasar relatif baik, akses pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi masih menjadi tantangan serius di Lampung. Kondisi ini mempertegas perlunya intervensi kebijakan yang lebih terarah untuk memastikan kesetaraan akses pendidikan bagi kelompok miskin dan miskin ekstrem.

Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial meluncurkan Program Sekolah Rakyat sebagai bentuk kebijakan afirmatif yang ditujukan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif dan berasrama (Setkab.go.id, 2025). Program ini merupakan tindak lanjut langsung dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Kemensos RI, 2025).

Dalam tahap awal pelaksanaannya, pemerintah menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total sekitar 340 rombongan belajar dan kapasitas 8.850 siswa yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan rentan. Untuk mendukung operasional program ini, alokasi anggaran tahun 2025 mencapai Rp 1,19 triliun, mencakup pengembangan kurikulum (+- Rp 3 miliar), rekrutmen dan pelatihan guru (+- Rp 119 miliar), serta pembangunan dan pengadaan sarana-prasarana (+- Rp 341 miliar).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan karakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau menengah bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan (Pasal 1). Selain itu, Pasal 2 menyebutkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Melalui pendekatan pendidikan berasrama, Sekolah Rakyat berupaya membentuk karakter, kemandirian, dan keterampilan sosial peserta didik sehingga mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Permensos ini juga menetapkan tiga jenis Sekolah Rakyat, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama, Sekolah Rakyat Menengah Atas, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi, dengan penyelenggaraan

pendidikan yang menekankan prinsip kesetaraan, kolaborasi lintas instansi, dan akuntabilitas sosial (Pasal 3 dan 30).

Pemerintah juga telah menyiapkan perluasan tahap kedua pada tahun 2026 dengan target 200 Sekolah Rakyat di berbagai provinsi dan total anggaran sebesar Rp 24,9 triliun, sebagai bagian dari upaya sistematis untuk memperkuat pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem di seluruh wilayah Indonesia.

Besarnya alokasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa Program Sekolah Rakyat diposisikan sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam mengurangi ketimpangan akses pendidikan dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi (menpan.go.id, 2025). Dari sudut pandang perumusan kebijakan, desain ini merepresentasikan kerangka *policy on paper* yang berasumsi bahwa penyediaan sumber daya yang memadai dan desain kurikulum yang komprehensif akan menghasilkan luaran sesuai tujuan. Kerangka konseptual ini menjadi landasan penting untuk menganalisis sejauh mana implementasi di tingkat lapangan mampu merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan.

Meskipun demikian, idealitas kebijakan yang tertera dalam dokumen resmi sering kali tidak sepenuhnya tercermin dalam praktik implementasi di lapangan. Dalam teori *Street-Level Bureaucracy* (Lipsky, 2010), selalu terdapat kesenjangan antara *policy on paper* dan *policy in practice*. Meskipun Program Sekolah Rakyat memiliki dukungan regulasi dan anggaran besar (Rp 1,19 triliun), pelaksanaan kebijakan di lapangan sangat bergantung pada kapasitas, persepsi, dan strategi adaptasi aktor pelaksana di tingkat bawah, seperti guru, pengelola asrama, dan kepala sekolah.

Lipsky menegaskan bahwa pelaksana kebijakan di garis depan (*street-level bureaucrats*) menghadapi konflik utama antara tuntutan masyarakat yang tinggi dengan keterbatasan sumber daya, waktu, dan energi psikologis. Dalam konteks Sekolah Rakyat, guru dan pengelola asrama dihadapkan pada kondisi siswa dari keluarga miskin ekstrem yang memiliki permasalahan multidimensi (akademik, sosial, emosional), sementara fasilitas, tenaga, dan waktu mereka terbatas. Situasi

ini memunculkan bentuk-bentuk diskresi (*discretion*) sebagai strategi adaptasi agar kebijakan tetap dapat berjalan.

Program Sekolah Rakyat dirumuskan sebagai respons terhadap tantangan pendidikan nasional yang bersifat kompleks dan multidimensional. Sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi kesenjangan yang tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan kultural (menpan.go.id, 2025). Meskipun Angka Partisipasi Sekolah (APS) secara nasional menunjukkan tren peningkatan, disparitas tetap terlihat, khususnya di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur, rendahnya dukungan keluarga, serta persepsi sosial yang belum sepenuhnya mendukung pentingnya pendidikan. Kondisi ini menciptakan perbedaan antara capaian statistik nasional yang menunjukkan perbaikan dan realitas di lapangan, di mana sebagian kelompok masyarakat masih menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan yang setara. Kesenjangan tersebut berdampak pada berbagai jenjang pendidikan, termasuk pada Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi, yang menunjukkan bahwa sebagian lulusan sekolah menengah belum melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

Dalam menghadapi tantangan implementasi kebijakan yang kompleks, peran pelaksana di tingkat operasional menjadi krusial. Guru, pengelola sekolah rakyat, dan staf dinas terkait merupakan aktor yang berinteraksi langsung dengan peserta didik serta memiliki ruang diskresi yang cukup besar dalam pengambilan keputusan (Lipsky, 2010a). Dalam konteks Program Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung, pelaksana di lapangan tidak hanya bertindak sebagai eksekutor kebijakan, tetapi juga secara faktual melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap kondisi riil sehingga kebijakan tetap dapat dijalankan secara efektif (Oliveira et al., 2021).

Salah satu lokasi pelaksanaan program tersebut di Provinsi Lampung adalah Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 32 Lampung Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Permensos RI Nomor 7 Tahun 2025. Sekolah ini menjadi representasi implementasi kebijakan di tingkat daerah yang penting untuk

dikaji karena berada di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang masih signifikan dan angka partisipasi kasar yang relatif rendah. Dengan demikian, Lampung menjadi lokasi yang relevan untuk melihat bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan ke dalam praktik di tingkat lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara pra-riset yang dilakukan dengan Kepala Sekolah SRMA 32 Lampung Selatan pada 19 September 2025 di lokasi sekolah menunjukkan bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat menghadapi berbagai dinamika, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga bentuk diskresi yang dilakukan oleh tenaga pendidik dalam menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi lokal.

Program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan lintas sektor yang melibatkan Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan. Hal ini menjadikan birokrat pelaksana di SRMA 32 Lampung Selatan menghadapi peran ganda sebagai pendidik sekaligus pembimbing sosial. Mereka juga harus berkoordinasi dengan aktor tingkat daerah seperti Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang berperan sebagai *broker* dalam penyediaan sarana, tenaga, dan dukungan administratif. Kompleksitas koordinasi multi-level inilah yang sering menjadi sumber tantangan implementasi kebijakan sosial baru seperti Sekolah Rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif kebijakan yang penting untuk dikaji lebih lanjut, terutama karena pelaksanaannya sangat bergantung pada interaksi langsung antara birokrat pelaksana dan peserta didik. Dalam konteks tersebut, perspektif *Street-Level Bureaucracy* (SLB) (Lipsky, 2010) menawarkan keunggulan teoretis yang tidak dimiliki pendekatan implementasi kebijakan lainnya. Teori ini menekankan bahwa pelaksana kebijakan di tingkat lapangan seperti kepala sekolah, guru, dan wali asrama memiliki diskresi yang besar dalam menafsirkan aturan dan menentukan cara pelayanan diberikan, terutama ketika menghadapi keterbatasan sumber daya, beban kerja, dan kebutuhan peserta didik yang beragam.

Keunggulan teori *Street-Level Bureaucracy (SLB)* (Lipsky, 2010) adalah kemampuannya menjelaskan bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam praktik sehari-hari dan mengapa hasil implementasi dapat berbeda antar lokasi meskipun kebijakannya sama. Pendekatan ini sangat relevan bagi Program Sekolah Rakyat yang bersifat holistik, baru, dan menyasar anak dari keluarga miskin ekstrem, sehingga peran birokrat garis depan menjadi sangat menentukan. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan studi sebelumnya dengan menganalisis implementasi Program Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung melalui perspektif *Street-Level Bureaucracy (SLB)* (Lipsky, 2010) untuk memahami secara mendalam dinamika pelaksanaan di tingkat lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Program Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung ditinjau melalui pendekatan *Street-Level Bureaucracy*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Program Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung dengan menggunakan perspektif *Street-Level Bureaucracy*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi pada kajian ilmu administrasi publik, khususnya implementasi kebijakan pendidikan melalui perspektif *Street-Level Bureaucracy*.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi pemerintah pusat dalam menyempurnakan desain Program Sekolah Rakyat agar lebih adaptif terhadap tantangan implementasi di tingkat daerah.
- b. Menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan pemerintah daerah dalam meningkatkan koordinasi, penyediaan sarana-prasarana, serta kapasitas pelaksana lapangan untuk menjamin keberlangsungan program.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan landasan konseptual sekaligus referensi bagi penulis dalam menyusun penelitian ini. Dengan merujuk pada karya-karya sebelumnya, penulis dapat memperkaya perspektif teoretis serta memperdalam analisis yang dilakukan. Beberapa penelitian yang dianggap relevan dan dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Temuan	Perbandingan Penelitian
1.	Alsharefeen, R. (2025, August). Faculty as <i>Street-level bureaucrats</i> : Discretionary Decision-Making in the Era of Generative AI. In <i>Frontiers in Education</i> (Vol. 10, p. 1662657). Frontiers.	Dosen bertindak sebagai birokrat lapangan, menggunakan diskresi dan strategi koping (edukasi preventif, modifikasi tugas) untuk mengatasi tantangan plagiarisme AI, sehingga menjadi pembuat kebijakan <i>de facto</i> di lapangan.	Persamaan: Menggunakan perspektif teoretis <i>Street-Level Bureaucracy (SLB)</i> dan berfokus pada peran individu dalam sektor pendidikan. Perbedaan: Berfokus pada dinamika di perguruan tinggi dan tantangan teknologi, bukan pada implementasi program pendidikan holistik berbasis asrama di tingkat sekolah

No.	Judul Penelitian	Temuan	Relevansi dengan Penelitian
2.	Edri-Peer, O., & Cohen, N. (2025). Revisiting <i>coping mechanisms</i> on the street-level: a systematic literature review. <i>Journal of Public Administration Research and Theory</i> , muaf022.	Mengidentifikasi mekanisme coping baru yang disebut " <i>moving with clients</i> ," di mana birokrat lapangan berkolaborasi dengan klien untuk mencapai tujuan kebijakan. Temuan utama menunjukkan perilaku SLB dipengaruhi faktor organisasional dan lingkungan.	Persamaan: Menyediakan kerangka konseptual mutakhir untuk menganalisis strategi coping, yang relevan untuk guru dan wali asrama Program SR. Perbedaan: Merupakan tinjauan literatur teoretis, bukan studi kasus empiris yang berfokus pada kebijakan spesifik di Indonesia.
3.	Madani, M., Iva, M. I. N., & Amiruddin, I. (2021). Peran street level bureaucracy dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Makassar. <i>Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik</i> , 7(3), 333-343.	Birokrat lapangan di Dinas Pertanian berperan sebagai supervisor dan pemantau di tingkat akar rumput, membuktikan konsep SLB relevan dalam konteks birokrasi di Indonesia.	Persamaan: Memperkuat argumen bahwa teori SLB dapat diterapkan secara valid pada kasus-kasus di birokrasi Indonesia. Perbedaan: Berfokus pada sektor pertanian dan konteks geografis yang berbeda, sehingga tidak secara langsung mengkaji implementasi kebijakan pendidikan afirmatif.
4.	Akhyar, Y. (2024). Implementasi Sistem Zonasi Pada Program Penerimaan Peserta Dididik Baru (PPDB): Studi Kasus SMAN 2 Pekanbaru. <i>Edusiana: Jurnal Ilmu Pendidikan</i> , 2(1), 105-118..	Kebijakan zonasi, meskipun bertujuan pemerataan, menimbulkan tantangan implementasi seperti ketidakpuasan orang tua dan kesenjangan fasilitas, yang membutuhkan peran aktif aktor lapangan.	Persamaan: Memberikan analogi kuat mengenai kendala implementasi kebijakan pendidikan terpusat di tingkat sekolah. Perbedaan: Mengkaji kebijakan zonasi, yang berfokus pada pemerataan akses geografis, bukan pada program holistik yang menargetkan kelompok miskin ekstrem dan mencakup pendidikan asrama dan vokasional.
5.	Novayanti, N., Warman, W., & Dwiyono, Y. (2023). Implementasi Program Sekolah Penggerak dalam Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar di Sekolah	Program Sekolah Penggerak menghadapi tantangan seperti pendanaan yang tidak cukup, perbedaan tingkat pemahaman guru, dan	Persamaan: Menunjukkan tantangan implementasi yang serupa pada program pendidikan baru di tingkat sekolah.

No.	Judul Penelitian	Temuan	Relevansi dengan Penelitian
	Dasar. <i>Jurnal Manajemen Pendidikan</i> , 3, 151-160.	<i>Ilmu</i> perlunya kolaborasi <i>Dan</i> antarguru.	Perbedaan: Fokus pada Program Sekolah Penggerak (kurikulum Merdeka Belajar), yang berbeda secara desain, sasaran, dan skala dari Program Sekolah Rakyat.

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Analisis terhadap tabel di atas menunjukkan bahwa secara kolektif, penelitian terdahulu memberikan tiga kontribusi penting. Pertama, penelitian-penelitian tersebut memvalidasi relevansi teori *Street-Level Bureaucracy (SLB)* dalam konteks birokrasi Indonesia. Studi Madani et al. (2021) memperlihatkan penerapan teori ini di sektor pertanian, sedangkan Alsharefeen (2025) dan Akhyar (2024) memperkuat relevansinya di sektor pendidikan. Kedua, literatur yang ada mengonfirmasi bahwa implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia sering menghadapi hambatan struktural, seperti keterbatasan sumber daya, resistensi birokrasi, dan ketimpangan infrastruktur pendidikan. Ketiga, penelitian-penelitian tersebut menekankan pentingnya peran birokrat tingkat lapangan dalam menafsirkan, menyesuaikan, dan mengeksekusi kebijakan agar tetap relevan dengan kondisi lokal.

Kontribusi penelitian sebelumnya penting, tetapi masih terdapat kesenjangan yang perlu dijawab. Belum ada kajian yang secara eksplisit dan mendalam menelaah implementasi program kebijakan yang bersifat holistik dan multi-komponen seperti Program Sekolah Rakyat, yang menggabungkan pendidikan formal, vokasional, dan sistem asrama. Selain itu, analisis mengenai dinamika implementasi kebijakan pendidikan di Provinsi Lampung masih terbatas, padahal wilayah ini menghadapi tantangan berupa angka putus sekolah yang tinggi dan rendahnya partisipasi pendidikan lanjut. Mengingat Program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan yang relatif baru, belum tersedia penelitian yang mendokumentasikan dilema implementasi awalnya, sehingga membuka ruang untuk menelaah dinamika diskresi dan strategi koping birokrat tingkat jalanan

pada tahap yang belum dibakukan oleh rutinitas birokrasi. Penelitian ini dirancang untuk mengisi celah tersebut sekaligus memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian implementasi kebijakan di Indonesia.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai "tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan, agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan" (Al Ayubi & Sri Arfiah, 2018). Konsep ini melampaui sekadar "penerapan." Mazmanian dan Sabatier mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya tertuang dalam undang-undang (Sobirin, 2023). Mereka menyoroti bahwa implementasi kebijakan jarang berjalan mulus, dan seringkali terdapat "celah implementasi" (*implementation gap*) yang signifikan antara tujuan kebijakan dan hasil akhirnya (Suaib et al., 2022). Celah ini menunjukkan bahwa implementasi adalah proses yang kompleks dan dinamis, dipengaruhi oleh berbagai variabel yang tidak terduga, dan menjadi landasan teoretis utama untuk menganalisis mengapa sebuah program mungkin menghadapi tantangan.

2.2.1 Model Implementasi Kebijakan

Dalam studi implementasi, terdapat tiga model utama yang sering digunakan:

1. Model *Top-down*

Model ini berfokus pada bagaimana sebuah keputusan otoritatif diimplementasikan. Para pendukungnya, seperti Pressman dan Wildavsky, melihat implementasi sebagai proses untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam dokumen formal. Aktor sentral dalam model ini adalah pembuat kebijakan di tingkat pusat, dan keberhasilan diukur dari kepatuhan terhadap kebijakan tersebut (Taufik & Sriharyati, 2020).

Kelemahan utama model ini adalah kecenderungannya untuk mengabaikan peran aktor-aktor di tingkat lokal, serta aspek politik dan faktual di lapangan, karena terlalu menekankan pada teks hukum (Taufik & Sriharyati, 2020).

2. Model *Bottom-Up*

Model ini muncul sebagai respons terhadap kelemahan pendekatan *Top-down*. Model *Bottom-Up* menegaskan bahwa implementasi kebijakan dapat bervariasi dari waktu ke waktu, antar kebijakan, dan antar daerah. Pendekatan ini berfokus pada kelompok sasaran dan penyedia layanan di tingkat lokal, dengan asumsi bahwa kebijakan dibuat di tingkat akar rumput (Taufik & Sriharyati, 2020). Kelebihan dari model ini adalah fleksibilitasnya yang dapat beradaptasi dengan kesulitan dan faktor-faktor kontekstual lokal. Namun, kelemahannya adalah cenderung melebih-lebihkan otonomi lokal dan mengabaikan arah politik dari pemerintah pusat. Model ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan bersifat dinamis, sehingga dapat mengalami variasi secara temporal, antarjenis kebijakan, maupun antarwilayah.

3. Model *Hybrid*

Model ini merupakan kombinasi yang mengintegrasikan variabel-variabel kunci dari kedua pendekatan. Model *Hybrid* menggabungkan perbandingan lintas kebijakan dan menekankan peran instrumen kebijakan dan kebijakan yang praktis untuk mencapai tujuan. Pendekatan ini mengakui pentingnya perencanaan dari atas (*Top-down*) sambil juga berfokus pada tindakan individu sebagai titik awal (*Bottom-Up*). Aspek terpenting dari model ini adalah "tanggung jawab" dari atas dan "kepercayaan" dari bawah (Kawer et al., 2018).

Penggunaan model hibrida dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik Program Sekolah Rakyat yang memiliki ambiguitas dan kompleksitas tinggi. Secara struktural, program ini bersifat *top-down*

karena dikendalikan melalui regulasi pusat dan pengawasan digital yang ketat. Namun, secara operasional, model ini mengakui bahwa 'nyawa' dari kebijakan pendidikan asrama bagi kelompok miskin ekstrem berada pada kapasitas adaptasi aktor di tingkat bawah. Oleh karena itu, pendekatan hibrida ini menjadi jembatan logis untuk menempatkan teori *Street-Level Bureaucracy* (Lipsky, 2010) bukan sebagai penyimpangan kebijakan, melainkan sebagai bentuk otonomi yang diperlukan dalam kerangka koordinasi nasional.

Teori Birokrasi Tingkat Jalanan adalah sebuah bentuk spesifik dari pendekatan *Bottom-Up*. Penelitian ini akan menggunakan model *hybrid* sebagai kerangka analisis, yang memungkinkan untuk mengkaji bagaimana arahan dari pusat (*Top-down*) berinteraksi dengan diskresi dan adaptasi yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah di lapangan (*Bottom-Up*).

2.2.2 Faktor yang Memengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam apriyanti, 2022), faktor-faktor ini meliputi:

- a) Ukuran dan tujuan kebijakan yang harus jelas dan terukur
- b) Ketersediaan sumber daya, termasuk dana dan insentif
- c) Kualitas komunikasi antarorganisasi dan pelaksana
- d) Karakteristik badan-badan pelaksana (terkait dengan struktur birokrasi)
- e) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dan
- f) Disposisi atau kecenderungan para pelaksana.

Mazmanian dan Sabatier (Delarista et al., 2025) menawarkan kerangka analisis yang lebih terperinci dengan mengklasifikasikan variabel-variabel yang memengaruhi implementasi ke dalam tiga kelompok utama:

1. Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan (*Tractability of the Problem*)

Kelompok ini meliputi kesulitan teknis dari masalah yang diatur, keragaman perilaku kelompok sasaran, dan besarnya perubahan perilaku yang diperlukan.

2. Kemampuan Kebijakan untuk Menstrukturkan Implementasi (*Ability of Statute to Structure Implementation*)

Variabel ini mencakup kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan, teori kausal yang memadai, alokasi sumber daya yang tepat, dan integrasi hierarkis antarlembaga pelaksana.

3. Variabel di Luar Kebijakan (*Non-Statutory Variables*)

Kelompok ini mencakup kondisi sosial-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, dan komitmen beserta kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Kesenjangan antara tujuan yang dirumuskan secara jelas (faktor 2) dengan kondisi masalah yang sulit (faktor 1) dan kondisi eksternal yang tidak ideal (faktor 3) akan memaksa para implementor untuk melakukan penyesuaian. Ini adalah titik di mana teori implementasi kebijakan yang bersifat makro bertemu dengan teori Birokrasi Tingkat Jalanan yang bersifat mikro, menjelaskan bagaimana faktor-faktor ini berperan dalam implementasi Program Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung.

2.3 Teori *Street-Level Bureaucracy*

Studi mengenai implementasi kebijakan publik mengalami perkembangan penting sejak diterbitkannya karya Michael Lipsky yang berjudul *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services* pada tahun 1980. Teori ini memperkenalkan paradigma baru yang menantang pendekatan tradisional *top-down*, yaitu pendekatan yang memandang kebijakan sebagai keputusan yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan di tingkat pusat dan kemudian dilaksanakan secara mekanis oleh birokrat pelaksana di tingkat bawah (Gilson, 2015). Lipsky (2010) berpendapat bahwa implementasi kebijakan jauh

lebih kompleks daripada sekadar proses administratif, karena warga negara tidak berinteraksi dengan kebijakan sebagai dokumen formal, melainkan dengan tindakan dan keputusan sehari-hari dari pekerja publik di garis depan yang dikenal sebagai *street-level bureaucrats*.

Teori *Street-Level Bureaucracy* mengintegrasikan perspektif administrasi publik, kebijakan publik, dan ilmu politik dengan menekankan pentingnya otonomi serta kewenangan pengambilan keputusan yang dimiliki oleh birokrat di tingkat lapangan. Berbeda dari pandangan yang memosisikan implementasi sebagai proses teknis semata, Lipsky menekankan bahwa kebijakan pada praktiknya terbentuk melalui interaksi dinamis antara birokrat dan warga negara. Interaksi tersebut dapat menghasilkan variasi dalam pelaksanaan kebijakan, bahkan dalam beberapa kasus dapat menimbulkan perbedaan antara tujuan kebijakan yang tertulis dengan praktik implementasi di lapangan. Dengan demikian, Lipsky menegaskan bahwa proses pembentukan kebijakan tidak hanya terjadi pada tahap perumusan, tetapi juga berlangsung pada tahap implementasi melalui keputusan-keputusan yang dibuat oleh pelaksana di tingkat bawah (Lipsky, 2010).

Menurut Lipsky, birokrat tingkat jalanan merupakan pekerja sektor publik yang secara rutin berinteraksi langsung dengan warga negara dan memiliki ruang diskresi yang luas dalam menentukan alokasi manfaat maupun penerapan sanksi publik (Gilson, 2015). Mereka tidak hanya bertindak sebagai pelaksana aturan, tetapi juga sebagai *policy makers de facto*, karena keputusan-keputusan individual yang mereka ambil secara kumulatif membentuk pengalaman nyata masyarakat terhadap suatu kebijakan (Lipsky, 2010). Contoh klasik birokrat tingkat jalanan meliputi guru, polisi, pekerja sosial, tenaga kesehatan, dan aparatur pelayanan publik lainnya (Lipsky, 2010). Posisi mereka menjadi strategis karena berfungsi sebagai penghubung antara struktur birokrasi di tingkat atas dengan kebutuhan warga negara di tingkat akar rumput.

Peran birokrat tingkat jalanan sebagai pembentuk kebijakan di tingkat implementasi dibangun atas dua elemen utama, yaitu tingginya tingkat diskresi

dan otonomi relatif dari pengawasan organisasi (Barus, 2022). Diskresi dalam konteks ini merujuk pada ruang kebebasan pelaksana untuk menafsirkan aturan, menilai situasi, dan mengambil keputusan dalam menghadapi kondisi konkret di lapangan. Namun demikian, birokrat tingkat jalanan juga menghadapi ambiguitas peran karena mereka harus bertindak sebagai pelayan publik sekaligus sebagai penjaga gerbang (*gatekeepers*) yang menentukan akses warga terhadap layanan publik (Lipsky, 2010). Kondisi tersebut menciptakan ketegangan antara idealisme pelayanan publik dan realitas lapangan yang menuntut adanya perilaku adaptif.

Kondisi kerja birokrat tingkat jalanan ditandai oleh sejumlah dilema struktural yang memengaruhi perilaku mereka. Dilema tersebut mencakup keterbatasan sumber daya yang bersifat kronis, baik dari segi waktu, informasi, fasilitas, maupun anggaran; permintaan layanan yang terus meningkat; serta tujuan organisasi yang sering kali ambigu atau saling bertentangan (Lipsky, 2010). Dalam kondisi tersebut, birokrat tingkat jalanan tidak selalu memiliki kapasitas untuk merespons setiap kasus secara individual dengan standar pengambilan keputusan yang ideal (Edri-Peer & Cohen, 2025). Edri-Peer dan Cohen (2025) juga menegaskan bahwa dilema struktural dalam pekerjaan birokrat tingkat jalanan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku pelaksana, bahkan sering kali lebih besar dibandingkan faktor personal.

Lipsky menggambarkan posisi birokrat tingkat jalanan sebagai titik paling kompleks dalam pelayanan negara, karena pada level inilah tuntutan kebijakan bertemu langsung dengan masalah sosial masyarakat. Dalam kondisi kerja yang penuh tekanan, setiap peningkatan kapasitas atau alokasi anggaran sering kali terserap oleh meningkatnya permintaan layanan, sehingga tidak selalu menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan secara signifikan. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut Lipsky sebagai siklus mediokritas, yaitu situasi ketika keterbatasan sumber daya dan tingginya kebutuhan masyarakat terus menghasilkan tekanan terhadap kualitas layanan.

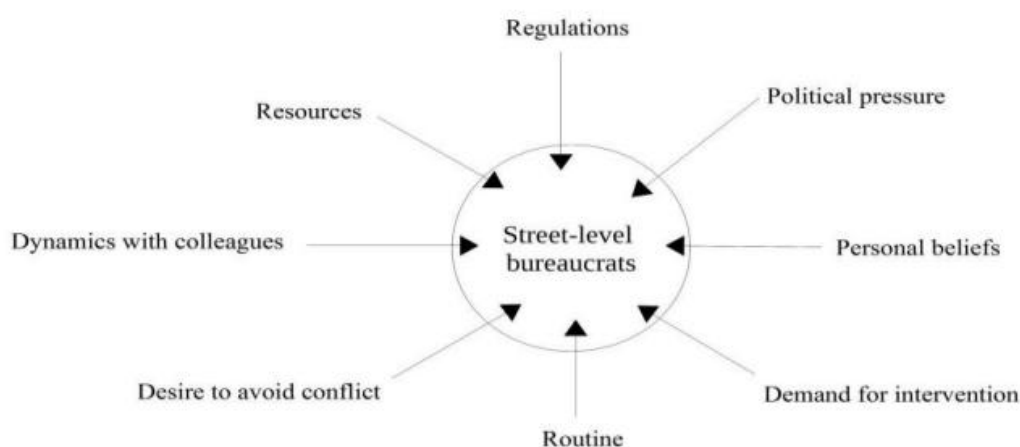
Tekanan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hambatan, tetapi juga membentuk perilaku birokrat tingkat jalanan. Lingkungan kerja yang penuh tekanan menciptakan kebutuhan terhadap diskresi dan mekanisme adaptasi agar pekerjaan tetap dapat diselesaikan. Ketika organisasi tidak mampu menyediakan pedoman yang rinci untuk seluruh variasi kasus di lapangan, birokrat tingkat jalanan mengembangkan strategi tertentu untuk mengelola beban kerja mereka. Strategi tersebut sering kali tidak tertulis secara formal, tetapi menjadi bagian penting dalam praktik implementasi kebijakan.

Dalam literatur *Street-Level Bureaucracy*, strategi adaptasi tersebut dikenal sebagai strategi koping (*coping strategies*). Strategi koping merujuk pada cara-cara yang digunakan birokrat tingkat jalanan untuk bertahan dalam situasi kerja yang penuh keterbatasan. Bentuk strategi koping dapat berupa penyederhanaan prosedur, pembentukan rutinitas, standarisasi pelayanan, pengelompokan penerima layanan, pembatasan akses layanan, maupun penyesuaian target pelayanan. Strategi ini muncul bukan semata-mata karena pelaksana ingin menyimpang dari aturan, tetapi karena terdapat ketidakseimbangan antara tuntutan ideal kebijakan dengan kapasitas nyata yang tersedia di lapangan (Lipsky, 2010).

Dalam konteks penelitian ini, guru, kepala sekolah, wali asrama, dan pelaksana Program Sekolah Rakyat di SRMA 32 Lampung Selatan dapat dipahami sebagai birokrat tingkat jalanan. Mereka berinteraksi langsung dengan siswa sebagai penerima manfaat program, sekaligus memiliki ruang untuk menafsirkan aturan dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun Program Sekolah Rakyat telah dirancang untuk menyasar keluarga miskin ekstrem, keberhasilan program di tingkat lapangan sangat dipengaruhi oleh cara para pelaksana memahami, menafsirkan, dan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi siswa dan lingkungan asrama.

Street-Level Bureaucracy merujuk pada birokrasi tingkat operasional yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Aparatur pada level ini berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik sekaligus pemberi layanan kepada warga, sehingga posisinya sangat strategis dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan (Lipsky, 2010). Menurut Ham & Hill serta Sarius dalam Maharani Devi & Ismail, (2024), terdapat delapan faktor utama yang memengaruhi implementasi kebijakan di tingkat birokrasi lapangan. Faktor-faktor tersebut menentukan bagaimana *Street-level bureaucrats* (SLB) menggunakan diskresinya dalam memberikan pelayanan publik.

Dalam konteks penelitian ini, guru, kepala sekolah, dan fasilitator Program Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung berperan sebagai SLB yang secara langsung menentukan keberhasilan implementasi program. Meskipun kebijakan Sekolah Rakyat telah dirancang untuk menargetkan keluarga miskin ekstrem, keberhasilan di lapangan sangat dipengaruhi oleh bagaimana SLB memahami, menafsirkan, dan melaksanakan kebijakan tersebut. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi perilaku SLB dalam implementasi Program Sekolah Rakyat adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Model Street Level Bureaucracy (Lipsky 2010)

Sumber: Maharani & Ismail (2024)

1. Regulasi (*Regulations*)

Regulasi adalah aturan dan pedoman yang menjadi acuan bagi birokrat dalam menjalankan tugasnya. Dalam kasus Program Sekolah Rakyat, meskipun landasan hukumnya kuat (UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003) dan terdapat petunjuk teknis yang jelas, pelaksana di lapangan sering menghadapi situasi yang tidak dapat diprediksi oleh regulasi. Ketika renovasi gedung belum selesai, misalnya, para guru harus beradaptasi dengan kondisi yang ada, bahkan jika itu berarti menyimpang dari pedoman yang mengharuskan pembelajaran tatap muka di asrama.

2. Tekanan Politik (*Political Pressure*)

Tekanan politik berasal dari komitmen pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk merealisasikan program prioritas nasional. Para birokrat di Sekolah Rakyat berada di bawah tekanan untuk menunjukkan keberhasilan dan efektivitas program. Tekanan ini dapat memengaruhi keputusan mereka, mulai dari memastikan siswa terdaftar hingga mencari solusi kreatif ketika terjadi hambatan struktural.

3. Keyakinan Pribadi (*Personal Belief*)

Keyakinan pribadi para pendidik dan staf Program Sekolah Rakyat memainkan peran krusial. Mereka optimistis dan percaya bahwa program ini dapat menjadi fondasi untuk memutus rantai kemiskinan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi siswa. Keyakinan ini mendorong mereka untuk tetap berkomitmen pada tujuan program meskipun menghadapi kendala, seperti yang ditunjukkan oleh keputusan untuk tetap menerima siswa yang tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan demi melayani kelompok sasaran yang paling membutuhkan.

4. Kebutuhan Intervensi (*Demand for Intervention*)

Tingginya angka kemiskinan dan putus sekolah di Provinsi Lampung menciptakan kebutuhan mendesak akan intervensi pendidikan yang efektif. Program Sekolah Rakyat dirancang untuk memenuhi permintaan ini secara

holistik, termasuk dengan meniadakan hambatan finansial yang selama ini menjadi beban keluarga. Para birokrat di lapangan harus mengelola permintaan yang besar ini dengan sumber daya yang terbatas.

5. Rutinitas (*Routine*)

Untuk mengelola tingginya beban kerja, birokrat tingkat jalanan cenderung menciptakan rutinitas kerja yang terstandarisasi. Ketika pembelajaran tatap muka tidak memungkinkan, mereka mengadopsi rutinitas pembelajaran daring, meskipun dengan durasi yang terbatas. Pembentukan rutinitas ini memungkinkan mereka untuk terus beroperasi dan memberikan layanan dalam kondisi yang tidak ideal.

6. Keinginan untuk Menghindari Konflik (*Desire to Avoid Conflict*)

Para birokrat di Sekolah Rakyat berusaha menghindari konflik yang dapat mengganggu jalannya program. Keputusan untuk menerima siswa yang tidak memenuhi kriteria kesehatan, misalnya, dapat menjadi cara untuk menghindari konflik dengan keluarga siswa dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat, yang pada akhirnya mendukung kelancaran program secara keseluruhan.

7. Dinamika dengan Rekan Kerja (*Dynamic with Colleagues*)

Implementasi Program Sekolah Rakyat melibatkan koordinasi yang kompleks antar-lembaga, termasuk Kemensos, Kemendikdasmen, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dinamika hubungan antar-rekan kerja, baik di dalam sekolah maupun antar-instansi, sangat penting. Keterlambatan renovasi gedung menunjukkan adanya hambatan dalam koordinasi ini, yang pada akhirnya harus ditangani oleh staf di tingkat lapangan.

8. Sumber Daya (*Resources*)

Ketersediaan sumber daya adalah faktor fundamental. Meskipun Program Sekolah Rakyat memiliki alokasi dana yang besar keterlambatan dalam realisasi infrastruktur menunjukkan adanya kesenjangan antara alokasi

anggaran dan ketersediaan sumber daya aktual di lapangan. Keterbatasan ini memaksa para birokrat untuk berimprovisasi dan mencari solusi alternatif, seperti menjalankan pembelajaran daring.

Definisi analitis dan operasional dari setiap variabel ditetapkan untuk memastikan kejelasan konsep dan ketepatan pengukuran. Definisi analitis (DA) disusun untuk memberikan batasan konseptual yang jelas sesuai dengan teori yang mendasarinya, sedangkan definisi operasional (DO) digunakan untuk menjelaskan bagaimana variabel tersebut diukur atau diamati secara empiris di lapangan. Penyusunan DA dan DO ini penting agar penelitian memiliki dasar yang terstruktur, dapat direplikasi, dan menghasilkan temuan yang valid. Uraian mengenai definisi analitis dan operasional dari setiap variabel penelitian disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Definisi Analitis (DA) dan Definisi Operasional (DO) Variabel Penelitian

No.	Variabel Penelitian (Kriteria Lipsky 2010)	Definisi Analitis (DA)	Definisi Operasional (DO)
1.	Regulasi (<i>Regulations</i>)	Aturan dan pedoman formal yang ditetapkan oleh pemerintah dan berfungsi sebagai dasar hukum bagi implementasi Program Sekolah Rakyat.	Deskripsi mengenai pemahaman, penafsiran, dan penerapan aturan formal serta pedoman teknis (Juknis) oleh kepala sekolah dan staf, termasuk bagaimana mereka mengatasi situasi yang tidak diatur dalam dokumen tersebut.
2.	Tekanan Politik (<i>Political Pressure</i>)	Dorongan dari pembuat kebijakan dan pimpinan tertinggi untuk memastikan Program Sekolah Rakyat sebagai kebijakan prioritas nasional dapat berjalan dengan sukses di lapangan.	Pernyataan naratif dari Kepala Sekolah atau staf mengenai ekspektasi, target, atau arahan dari pimpinan (pemerintah pusat atau daerah) dan cara mereka merespons tekanan tersebut dalam pengambilan keputusan.
3.	Keyakinan Pribadi (<i>Personal Belief</i>)	Nilai, etika, dan prinsip pribadi yang dipegang oleh para birokrat tingkat jalanan, yang memengaruhi cara mereka menafsirkan dan menerapkan kebijakan.	Pernyataan naratif dari Kepala Sekolah, guru dan staff yang menjelaskan motivasi pribadi, etika, atau prinsip yang melatarbelakangi keputusan tertentu terkait implementasi program, seperti keputusan menerima siswa.

No.	Variabel Penelitian (Kriteria Lipsky 2010)	Definisi Analitis (DA)	Definisi Operasional (DO)
4.	Kebutuhan Intervensi (<i>Demand for Intervention</i>)	Keterbatasan atau masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat, yang memunculkan kebutuhan akan layanan publik dari pemerintah.	Persepsi dan deskripsi Kepala Sekolah mengenai skala permasalahan kemiskinan dan putus sekolah di wilayahnya, serta bagaimana hal ini memengaruhi urgensi dan prioritas program.
5.	Rutinitas (<i>Routine</i>)	Prosedur kerja dan kebiasaan yang tidak tertulis yang dikembangkan oleh birokrat tingkat jalanan untuk mengelola beban kerja yang konstan dan mengatasi ketidakpastian.	Deskripsi mengenai prosedur kerja, jadwal, atau kebiasaan tidak tertulis yang dikembangkan oleh staf dan guru untuk mengelola beban kerja, keterbatasan sumber daya, dan ketidakpastian di lapangan.
6.	Keinginan untuk Menghindari Konflik (<i>Desire to Avoid Conflict</i>)	Upaya para birokrat untuk meminimalkan ketegangan atau sengketa dengan klien atau stakeholder lain demi menjaga kelancaran pekerjaan.	Deskripsi tindakan atau keputusan yang diambil oleh birokrat untuk meminimalkan ketegangan atau potensi protes dari siswa, keluarga, atau masyarakat demi menjaga kelancaran program.
7.	Dinamika dengan Rekan Kerja (<i>Dynamic with Colleagues</i>)	Hubungan dan interaksi antar-birokrat, baik dalam satu institusi maupun antar-lembaga, yang memengaruhi proses pengambilan keputusan dan implementasi.	Deskripsi rinci dari Kepala Sekolah mengenai mekanisme komunikasi, pola koordinasi, dan tantangan yang dihadapi saat berinteraksi dengan staf internal dan instansi terkait.
8.	Sumber Daya (<i>Resources</i>)	Ketersediaan personel, fasilitas, anggaran, dan teknologi yang diperlukan untuk menjalankan program secara efektif.	Pernyataan dari Kepala Sekolah mengenai ketersediaan dan kondisi aktual fasilitas (gedung, asrama), personel, dan anggaran yang dapat diakses dan digunakan di tingkat operasional.

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

2.3.1 Tata Kelola Pendisiplinan (*Disciplinary Governance*) dan Kontrol Klien

Implementasi kebijakan publik bukan sekadar proses mekanis, melainkan sebuah dinamika yang dibentuk oleh interaksi harian antara pelaksana tingkat bawah dengan kelompok sasaran melalui mekanisme *disciplinary governance*. Dalam kerangka *Street-Level Bureaucracy*, Lipsky (2010) menegaskan bahwa aktor garis depan seperti guru dan wali asrama adalah

pembuat kebijakan secara *de facto* karena memiliki diskresi besar untuk menentukan bagaimana aturan formal diterapkan secara personal. Pemanfaatan diskresi ini sering kali mewujud dalam bentuk pengendalian terhadap klien (*control over clients*) yang bertujuan mengelola beban kerja sekaligus memastikan perilaku klien selaras dengan ekspektasi organisasi melalui teknologi pendisiplinan yang mengelola ruang, waktu, dan aktivitas individu (Foucault, 1977; Lipsky, 2010).

Urgensi tata kelola pendisiplinan ini semakin nyata dalam organisasi yang memiliki karakteristik institusi total (*total institution*), di mana seluruh siklus hidup individu diatur secara formal oleh otoritas tunggal dalam jangka waktu tertentu (Goffman, 1961). Dalam konteks sekolah berasrama, pendisiplinan berfungsi sebagai instrumen resosialisasi untuk melakukan proses "pematian jati diri" (*mortification of the self*) lama yang dianggap tidak produktif, untuk kemudian dibangun kembali melalui disiplin kolektif dan habituasi nilai-nilai baru. Habituasi ini bukan sekadar kepatuhan fisik, melainkan upaya sistematis birokrat lapangan untuk menanamkan modal budaya dan etika kerja yang dibutuhkan oleh kelompok marjinal demi mencapai mobilitas sosial di masa depan (Goffman, 1961; Lipsky, 2010).

Dengan demikian, keberadaan diskresi (*discretionary power*) bagi pelaksana lapangan menjadi jembatan krusial antara idealitas kebijakan pusat dengan realitas psikososial siswa di lapangan. Diskresi memungkinkan birokrat lapangan untuk melakukan penyesuaian strategi pendisiplinan yang lebih kontekstual dan empatik, sehingga aturan tidak hanya bersifat koersif tetapi transformatif. Sebagaimana dijelaskan dalam logika birokrasi tingkat rendah, efektivitas program sosial seperti Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kemampuan aktor lapangan dalam menyeimbangkan penegakan aturan formal dengan fungsi pendampingan emosional guna menjamin keberlanjutan intervensi kebijakan (Lipsky, 2010).

2.4 Konsep Institusi Total (*Total Institution*)

Untuk menganalisis lokus penelitian yang berbentuk sekolah berasrama, penelitian ini menggunakan konsep institusi total yang diperkenalkan oleh Erving Goffman dalam karyanya *Asylums*. Goffman (1961) mendefinisikan institusi total sebagai tempat tinggal dan tempat kerja bagi sejumlah besar individu yang memiliki situasi serupa, terpisah dari masyarakat luas untuk jangka waktu tertentu, serta menjalani rutinitas hidup yang diatur secara formal oleh otoritas tunggal.

Konsep institusi total relevan digunakan dalam penelitian ini karena Program Sekolah Rakyat di SRMA 32 Lampung Selatan menerapkan sistem pendidikan berasrama. Dalam sistem tersebut, siswa tidak hanya mengikuti proses pembelajaran akademik, tetapi juga menjalani kehidupan sehari-hari di bawah pengaturan lembaga. Sekolah berasrama mengatur aspek belajar, istirahat, makan, ibadah, rekreasi, penggunaan barang pribadi, disiplin, dan interaksi sosial. Dengan demikian, sekolah berasrama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai ruang pembinaan karakter yang mengontrol sebagian besar aktivitas siswa.

Menurut Goffman (1961), ciri utama institusi total adalah runtuhnya batas antara berbagai bidang kehidupan manusia. Dalam kehidupan sosial biasa, aktivitas tidur, belajar, bekerja, bermain, dan beribadah dilakukan di tempat yang berbeda, dengan kelompok sosial yang berbeda, serta di bawah otoritas yang berbeda. Namun, dalam institusi total, seluruh aktivitas tersebut berlangsung dalam satu lingkungan yang sama, bersama kelompok orang yang sama, dan berada di bawah otoritas yang sama.

Karakteristik utama institusi total menurut Goffman (1961) meliputi:

1. Runtuhnya Batas Kehidupan: Seluruh aktivitas utama (tidur, bermain, dan bekerja) dilakukan di satu tempat yang sama, di bawah otoritas yang sama, dan dengan kelompok orang yang sama (*batch living*).

2. Manajemen Biner: Pemisahan tajam antara kelompok pengawas (staf) dan kelompok yang diawasi (warga binaan/siswa).
3. Proses Mortifikasi Diri (*Mortification of the Self*): Pelepasan identitas lama individu melalui penyeragaman dan aturan kaku guna membangun identitas baru yang selaras dengan misi institusi.

Salah satu konsep penting dalam pemikiran Goffman adalah *mortification of the self* atau pematian jati diri. Konsep ini merujuk pada proses ketika individu yang memasuki institusi total mengalami pelepasan sebagian identitas lamanya melalui berbagai mekanisme penyeragaman. Proses tersebut dapat berupa penggunaan seragam, pembatasan barang pribadi, pengaturan jadwal, pembatasan mobilitas, serta kewajiban mengikuti aturan kolektif. Tujuan dari proses ini adalah membentuk identitas baru yang sesuai dengan norma dan tujuan institusi (Goffman, 1961).

Dalam konteks sekolah berasrama, proses tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari resosialisasi. Siswa diarahkan untuk meninggalkan kebiasaan lama yang dianggap tidak sesuai dengan nilai program dan mengadopsi kebiasaan baru seperti disiplin, tanggung jawab, kemandirian, dan kepatuhan terhadap aturan. Namun, proses resosialisasi tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Siswa yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang rentan dapat mengalami tekanan psikologis, kesulitan adaptasi, maupun kerinduan terhadap keluarga.

Goffman (1961) juga menjelaskan bahwa kontrol menyeluruh dalam institusi total dapat memunculkan praktik informal yang disebut *underlife*. *Underlife* merupakan ruang-ruang tidak resmi tempat individu melakukan penyesuaian sekunder (*secondary adjustments*) untuk mempertahankan otonomi, martabat diri, atau kepuasan personal di luar kontrol formal institusi. Praktik ini tidak selalu muncul sebagai perlawanan terbuka, tetapi dapat berbentuk pelanggaran kecil, perilaku sembunyi-sembunyi, atau upaya memperoleh ruang kebebasan dalam lingkungan yang sangat terkontrol.

Dalam penelitian ini, konsep institusi total digunakan untuk memahami dinamika sosial di SRMA 32 Lampung Selatan sebagai sekolah berasrama. Konsep ini membantu menjelaskan mengapa sistem asrama menimbulkan tekanan adaptasi bagi siswa dan mengapa muncul kebutuhan bagi pelaksana untuk mengelola relasi, disiplin, serta pembinaan secara lebih kontekstual. Dengan demikian, teori Goffman memberikan kerangka untuk membaca sekolah berasrama sebagai ruang sosial yang tidak hanya mendidik, tetapi juga mengatur dan membentuk perilaku siswa secara menyeluruh.

2.5 Sintesis Teori dalam Konteks Sekolah Berasrama

Sintesis antara teori *Street-Level Bureaucracy* dari Lipsky dan konsep institusi total dari Goffman digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi Program Sekolah Rakyat di SRMA 32 Lampung Selatan. Kedua teori tersebut memiliki fokus yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Goffman (1961) menjelaskan struktur institusional yang mengatur kehidupan siswa secara menyeluruh, sedangkan Lipsky (2010) menjelaskan perilaku pelaksana lapangan dalam menafsirkan dan menyesuaikan kebijakan ketika berhadapan dengan realitas sosial yang kompleks.

Dalam konteks sekolah berasrama, institusi total menciptakan tekanan struktural bagi siswa dan pelaksana. Siswa harus menyesuaikan diri dengan rutinitas baru, aturan disiplin, pembatasan mobilitas, pola hidup kolektif, serta pengawasan yang berlangsung hampir sepanjang hari. Sementara itu, guru, wali asrama, kepala sekolah, dan pelaksana lain tidak hanya menjalankan fungsi akademik, tetapi juga fungsi pembinaan, pengawasan, pendampingan emosional, dan pengendalian perilaku.

Melalui perspektif Goffman (1961), proses habituasi dalam Program Sekolah Rakyat dapat dipahami sebagai bentuk resosialisasi dalam institusi total. Siswa diarahkan untuk membangun identitas baru melalui disiplin, pembiasaan, pengaturan jadwal, serta internalisasi nilai-nilai program. Namun, proses ini tidak selalu berjalan secara linear karena siswa memiliki latar belakang keluarga, pengalaman sosial, dan kebiasaan hidup yang beragam.

Pada titik inilah teori Lipsky menjadi penting. Pelaksana di tingkat lapangan tidak dapat hanya bergantung pada aturan formal dalam menghadapi variasi kondisi siswa. Dalam banyak situasi, pelaksana perlu menggunakan diskresi untuk menyesuaikan penerapan aturan dengan kondisi konkret. Diskresi tersebut dapat muncul dalam bentuk penyesuaian aturan penggunaan alat komunikasi, fleksibilitas kunjungan keluarga, pendekatan bertahap terhadap pelanggaran disiplin, pembentukan rutinitas kolektif, maupun pengembangan peran tambahan dalam pendampingan siswa.

Dengan demikian, institusi total memberikan konteks struktural yang menuntut kontrol dan pembinaan intensif, sedangkan birokrasi tingkat jalanan menjelaskan bagaimana pelaksana menggunakan diskresi untuk menjaga agar kontrol tersebut tetap dapat diterima dan dijalankan secara fungsional. Apabila aturan institusi total diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi siswa, maka potensi resistensi, tekanan psikologis, dan kegagalan adaptasi dapat meningkat. Sebaliknya, jika diskresi dilakukan tanpa batas, konsistensi aturan dan kepastian prosedur dapat terganggu.

Sintesis kedua teori ini menunjukkan bahwa implementasi Program Sekolah Rakyat berada dalam ketegangan antara kontrol dan fleksibilitas. Kontrol diperlukan untuk membentuk disiplin dan karakter siswa, sedangkan fleksibilitas diperlukan agar pembinaan tetap sesuai dengan kondisi sosial dan psikologis siswa. Dalam konteks tersebut, diskresi pelaksana dapat dipahami sebagai mekanisme penyesuaian yang memungkinkan program tetap berjalan di tengah tekanan institusional.

Hubungan antara konsep institusi total dan teori *Street-Level Bureaucracy* dapat dijelaskan dalam beberapa tahapan. Pertama, sistem asrama menciptakan struktur kontrol yang menyeluruh melalui aturan, jadwal, pengawasan, dan pembinaan kolektif. Kedua, struktur tersebut menimbulkan tantangan adaptasi bagi siswa dan beban kerja tambahan bagi pelaksana. Ketiga, pelaksana sebagai birokrat tingkat jalanan menggunakan diskresi untuk menyesuaikan aturan dan rutinitas dengan kondisi lapangan. Keempat, diskresi tersebut menjadi strategi koping untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi dan kebutuhan manusiawi siswa.

Dalam penelitian ini, diskresi tidak dipahami sebagai penyimpangan semata, melainkan sebagai mekanisme adaptif dalam implementasi kebijakan sosial. Diskresi menjadi penting karena Program Sekolah Rakyat berhadapan dengan kelompok sasaran yang memiliki kerentanan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dalam menafsirkan aturan secara bertanggung jawab.

Untuk memperjelas hubungan antara kedua teori tersebut, berikut disajikan matriks sintesis teori dalam konteks implementasi Program Sekolah Rakyat.

Tabel 5 Matriks Sintesis Teori dalam Implementasi Program Sekolah Rakyat

Dimensi Analisis	Konsep Institusi Total Goffman (1961)	Konsep Street-Level Bureaucracy Lipsky (2010)	Relevansi dalam Penelitian
Struktur Lingkungan	Lingkungan tertutup dan kontrol menyeluruh terhadap kehidupan anggota institusi.	Pelaksana bekerja dalam struktur organisasi yang membatasi tindakan.	SRMA 32 mengatur kehidupan siswa melalui sistem asrama dan pembinaan selama 24 jam.
Pola Rutinitas	Aktivitas dilakukan secara kolektif melalui jadwal yang terstruktur.	Pelaksana menciptakan rutinitas untuk mengelola beban kerja dan keterbatasan sumber daya.	Rutinitas asrama menjadi alat pembinaan sekaligus strategi efisiensi pelaksana.
Relasi Otoritas	Terdapat hubungan asimetris antara staf	Pelaksana memiliki diskresi dalam	Guru dan wali asrama menyeimbangkan peran

Dimensi Analisis	Konsep Institusi Total Goffman (1961)	Konsep Street-Level Bureaucracy Lipsky (2010)	Relevansi dalam Penelitian
	dan penghuni institusi.	menafsirkan dan menerapkan aturan.	sebagai penegak disiplin dan pendamping siswa.
Resosialisasi	Institusi membentuk identitas baru melalui penyeragaman dan pembinaan.	Diskresi digunakan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan dan proses pembinaan.	Proses habituasi siswa membutuhkan penyesuaian agar perubahan perilaku tidak menimbulkan resistensi berlebihan.
Resistensi dan Adaptasi	Muncul underlife dan secondary adjustments sebagai respons terhadap kontrol institusi.	Pelaksana menggunakan strategi koping untuk mengelola konflik dan menjaga stabilitas.	Pelanggaran kecil atau kesulitan adaptasi siswa ditangani melalui pendekatan pembinaan dan diskresi.
Sumber Daya	Kontrol total menuntut kapasitas pengawasan yang tinggi.	Birokrat tingkat jalanan bekerja dalam kondisi sumber daya terbatas.	Keterbatasan jumlah pengasuh mendorong pembentukan rutinitas kolektif dan penyesuaian pembinaan.
Tujuan Program	Institusi total diarahkan untuk membentuk perilaku dan identitas baru.	Pelaksana menafsirkan tujuan kebijakan sesuai dengan kondisi lapangan.	Keberhasilan program tidak hanya diukur dari kepatuhan aturan, tetapi juga dari keberlanjutan pembinaan siswa.

Diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan sintesis tersebut, Program Sekolah Rakyat dapat dipahami sebagai kebijakan pendidikan afirmatif yang dijalankan dalam lingkungan berasma dengan karakter institusional yang kuat. Dalam lingkungan tersebut, pelaksana di tingkat lapangan memainkan peran penting sebagai penghubung antara desain kebijakan dan realitas kehidupan siswa. Oleh karena itu, teori Goffman dan Lipsky digunakan secara bersamaan untuk menganalisis bagaimana struktur kontrol institusi dan diskresi pelaksana membentuk praktik implementasi kebijakan di SRMA 32 Lampung Selatan.

2.6 Program Sekolah Rakyat

Istilah Sekolah Rakyat sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah pendidikan Indonesia. Nama ini pernah digunakan pada tahun 1941–1946 sebelum diganti menjadi Sekolah Dasar. Pada masa itu, Sekolah Rakyat berfungsi untuk meningkatkan kemampuan baca-tulis masyarakat, terutama kelompok

berpenghasilan rendah. Penggunaan kembali istilah ini dalam kebijakan sekarang lebih mencerminkan upaya pemerintah membangun kesan bahwa program ini melanjutkan semangat pemerataan pendidikan sejak dulu (Guruberdaya, 2025).

Program Sekolah Rakyat versi sekarang dibuat sebagai respons terhadap masalah kemiskinan dan masih tingginya angka putus sekolah di berbagai daerah (Ramdani, 2025). Pemerintah memosisikan program ini sebagai bagian dari strategi nasional meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 (menpan.go.id, 2025). Pernyataan Presiden Prabowo Subianto misalnya bahwa pekerjaan orang tua tidak boleh membatasi masa depan anak menjadi dasar moral bagi program ini (Guruberdaya, 2025).

Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah yang dipilih untuk pelaksanaan awal program. Pemilihan ini didasarkan pada kondisi sosial-ekonomi daerah yang masih menghadapi tantangan besar. Pemerintah Provinsi menyatakan dukungan melalui penyediaan anggaran dan fasilitas pelaksanaan (Munthe, 2025). Namun, keberhasilan program tetap bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, kualitas perencanaan, serta konsistensi pendanaan hal yang sering kali menjadi tantangan dalam pelaksanaan program pendidikan di tingkat daerah.

2.6.1 Landasan Hukum dan Regulasi

Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah yang dirancang untuk menyediakan layanan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin atau yang mengalami putus sekolah (Arifa, 2025). Program ini diharapkan dapat menjadi instrumen kebijakan publik dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui penyediaan pendidikan yang inklusif, berkesinambungan, dan berkeadilan (menpan.go.id, 2025).

Secara hukum, Program Sekolah Rakyat memiliki beberapa dasar penting. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama Pasal 26 ayat (1), yang menempatkan pendidikan

nonformal sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Kedua, adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan, yang mengarahkan kementerian dan pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan.

Landasan yang lebih spesifik terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat, yang mengatur struktur kelembagaan, tugas dan fungsi pengelola, mekanisme pelaksanaan program, serta standar layanan yang harus dipenuhi. Permensos ini menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat di tingkat pusat maupun daerah, termasuk terkait pembentukan unit pelaksana, penugasan tenaga pendidik, dan penyediaan sarana pembelajaran.

Dengan berbagai perangkat regulasi tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa Program Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi jargon kebijakan, tetapi memiliki aturan operasional yang jelas. Meskipun demikian, efektivitas regulasi ini tetap bergantung pada bagaimana pemerintah daerah melaksanakannya dan apakah pendanaan yang dialokasikan cukup untuk memenuhi standar layanan yang ditetapkan.

2.6.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan Permensos RI Nomor 7 Tahun 2025, Sekolah Rakyat merupakan satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan karakter yang menyelenggarakan pendidikan formal bagi peserta didik dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan. Karena itu, tujuan program dalam regulasi ini lebih menekankan pada penyediaan akses pendidikan formal yang terstruktur, pelayanan berasrama, dan penguatan karakter, bukan hanya pada narasi pemutusan kemiskinan.

Tujuan program dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Memberikan layanan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau menengah bagi anak dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan rentan (Permensos 7/2025 Pasal 1 dan Pasal 4).
2. Menyediakan lingkungan pendidikan berbasis asrama yang mendukung pembelajaran, bimbingan, dan pengembangan karakter.
3. Meningkatkan keterjangkauan pendidikan bagi kelompok yang tidak bisa mengakses pendidikan reguler karena keterbatasan ekonomi dan lingkungan sosial (menpan.go.id, 2025).
4. Mendukung program nasional penanggulangan kemiskinan, sesuai arah Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

Sasaran program ditetapkan secara jelas dalam regulasi:

1. Sasaran utama:
Anak dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan rentan
2. Sumber data penetapan sasaran:
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
3. Prioritas penetapan:
Kelompok ekonomi terbawah (Desil 1 dan 2), kemudian Desil 3 apabila kuota belum terpenuhi (menpan.go.id, 2025).

Penetapan sasaran ini diperlukan karena Sekolah Rakyat diselenggarakan dengan pembiayaan penuh negara dan memiliki beban pengelolaan yang besar, sehingga ketepatan sasaran menjadi faktor penting untuk akuntabilitas program

2.6.3 Karakteristik dan Model Pengembangan Sekolah Rakyat

Program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan afirmatif pemerintah yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin ekstrem. Berbeda dengan sekolah formal pada umumnya, Sekolah Rakyat memiliki karakteristik khusus yang mencakup aspek peruntukan peserta didik, sistem pembelajaran, kurikulum, serta pembiayaan program.

Perbedaan antara Sekolah Rakyat dan sekolah umum dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 6 Perbedaan Sekolah Rakyat dan Sekolah Umum

Aspek	Sekolah Rakyat	Sekolah Umum
Peruntukan	Siswa dari keluarga miskin ekstrem	Siswa umum
Sistem Belajar	Boarding school (pembinaan 24 jam)	Full day (pulang setelah sekolah)
Kurikulum	Terintegrasi (karakter, keterampilan, bela negara)	Kurikulum nasional
Pembiayaan	100% gratis (termasuk biaya hidup)	Negeri terbatas gratis, swasta berbayar

Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia (2025)

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai sistem pembinaan sosial yang terintegrasi. Pendekatan berbasis asrama memungkinkan pembentukan karakter, kedisiplinan, serta kemandirian siswa secara lebih intensif dibandingkan dengan sistem pendidikan konvensional.

Selain memiliki karakteristik khusus, Sekolah Rakyat juga dirancang dengan model pembangunan yang terstandarisasi guna mendukung proses pembelajaran dan pembinaan siswa secara optimal. Model ini mencakup ketentuan mengenai lahan, bangunan, serta sarana dan prasarana pendidikan.

Tabel 7 Model Pembangunan Sekolah Rakyat

Aspek	Ketentuan
Sumber Lahan	Pemda, Perguruan Tinggi, BUMN, dan Swasta
Luas Lahan	5–10 hektar
Status Lahan	Bersertifikat dan tidak dalam sengketa
Bangunan	Sekolah, asrama (putra/putri), kantor, perumahan guru
Fasilitas	Sesuai standar nasional pendidikan

Akses	Jalan, air bersih, dan lingkungan memadai
Pengembangan	Tersedia lahan pengembangan

Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia (2025)

Model pembangunan tersebut menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai institusi pendidikan berbasis layanan terpadu, yang tidak hanya menyediakan fasilitas pembelajaran, tetapi juga lingkungan hidup yang mendukung pembinaan siswa secara menyeluruh. Standar sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan implementasi program, khususnya dalam sistem pendidikan berbasis asrama.

Dengan demikian, secara konseptual Program Sekolah Rakyat memiliki desain kebijakan yang komprehensif, baik dari aspek sistem pembelajaran maupun dukungan sumber daya. Desain ini menjadi acuan dalam menilai sejauh mana implementasi program di tingkat lapangan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.6.4 Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Rakyat

Selain model pembangunan, Program Sekolah Rakyat juga menetapkan standar minimal sarana dan prasarana sebagai penunjang utama dalam proses pembelajaran dan pembinaan siswa berbasis asrama. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan akademik, sosial, dan kehidupan sehari-hari siswa dapat terpenuhi secara optimal.

Tabel 8 Standar Minimal Sarana dan Prasarana Sekolah Rakyat

No	Fasilitas
1	Asrama
2	Ruang Kelas
3	Laboratorium
4	Perpustakaan
5	Ruang Guru
6	Ruang Kepala Sekolah

7	Ruang Tata Usaha
8	Ruang UKS
9	Ruang Ibadah
10	Ruang Makan
11	Fasilitas Olahraga
12	Ruang Keterampilan
13	Toilet dan Sanitasi
14	Toilet Asrama
15	Gudang
16	Ruang Kontrol

Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia (2025)

Standar sarana dan prasarana tersebut menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan dengan sistem layanan terpadu yang tidak hanya berfokus pada kegiatan belajar mengajar, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pembinaan karakter siswa. Ketersediaan fasilitas yang lengkap menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas sistem pendidikan berbasis asrama yang diterapkan.

2.6.5 Alur Pelaksanaan dan Seleksi Siswa

Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat diawali dengan proses seleksi calon peserta didik yang dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama unit pelaksana di daerah. Seleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta didik yang diterima benar-benar berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, atau rentan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025.

Selain mengacu pada ketentuan tersebut, mekanisme seleksi peserta didik juga dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis yang disusun oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kriteria Seleksi Peserta Didik

Kriteria seleksi peserta didik Sekolah Rakyat ditetapkan untuk menjamin ketepatan sasaran program. Peserta didik diprioritaskan berasal dari keluarga miskin atau miskin ekstrem yang termasuk dalam desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain itu, seleksi juga mempertimbangkan kondisi pendidikan, motivasi belajar, serta dukungan keluarga.

Tabel 9 Kriteria Seleksi Peserta Didik Sekolah Rakyat

Kriteria	Penjelasan
Status Ekonomi	Keluarga miskin/miskin ekstrem (DTSEN desil 1 & 2)
Kondisi Pendidikan	Putus sekolah atau berisiko putus sekolah
Motivasi	Memiliki kemauan untuk belajar dan berkembang
Dukungan Tua	Orang Tua Bersedia bekerja sama dengan sekolah
Kesehatan	Sehat jasmani dan rohani

Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia (2025)

Alur Seleksi Peserta Didik

Proses seleksi peserta didik dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 serta pedoman teknis pelaksanaan yang disusun oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu:

1. Pendaftaran

Calon siswa melakukan pendaftaran melalui sistem resmi Kementerian Sosial dengan mengisi data pribadi, informasi keluarga, serta melampirkan dokumen pendukung.

2. Verifikasi Sosial-Ekonomi

Data pendaftar dicocokkan dengan DTSEN dan diverifikasi melalui survei lapangan oleh pendamping PKH, Dinas Sosial, serta tim verifikasi untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga.

3. Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

Calon siswa menjalani pemeriksaan kesehatan, psikotes, serta tes potensi kognitif. Hasil tes digunakan sebagai dasar perencanaan pembelajaran, bukan sebagai alat seleksi utama (Indonesia.go.id, 2025).

4. Penetapan Peserta Didik

Penetapan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa peserta yang diterima sesuai dengan kriteria program.

Tabel 10. Tahapan Seleksi Peserta Didik

Tahapan	Keterangan
Seleksi Administratif	Verifikasi dokumen dan data DTSEN
Tes Akademik	Mengukur kemampuan dasar
Psikotes	Menilai kesiapan mental
Tes Kesehatan	Memastikan kondisi fisik
Home Visit	Verifikasi kondisi sosial ekonomi
Wawancara Orang Tua	Menilai dukungan keluarga

Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia (2025)

2.6.6 Komponen Program

1. Model Pendidikan Ber-asrama (*Boarding School*)

Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah ber-asrama (*boarding school*). Model ini dipilih untuk memastikan bahwa para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal dalam lingkungan yang stabil dan kondusif, yang mungkin tidak tersedia di lingkungan rumah mereka. Sistem asrama ini tidak hanya fokus pada pendidikan akademik, tetapi juga bertujuan untuk membentuk karakter, membangun kemandirian, dan menyediakan lingkungan yang aman dari pengaruh negatif (Savitri, 2025).

2. Kurikulum "*Tailor-made*"

Kurikulum Sekolah Rakyat dirancang secara khusus, yang dikenal sebagai kurikulum *tailor-made*, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan

peserta didik serta dinamika sosial di lingkungan sekitar mereka, dan mencakup tiga komponen utama (Savitri, 2025).

a. Kurikulum Persiapan (*Learner Preparatory*)

Tahap awal menekankan pemetaan potensi individu (talent mapping) melalui asesmen kesiapan fisik, mental, dan akademik siswa, yang menjadi landasan sebelum memasuki kegiatan belajar yang lebih intensif.

b. Kurikulum Sekolah Formal

Mengacu pada standar kurikulum nasional, kurikulum ini mencakup mata pelajaran inti, seperti Bahasa Inggris dan Matematika, yang diperkuat untuk meningkatkan daya saing. Program ini juga menyelenggarakan kelas keterampilan yang mencakup berbagai bidang sesuai minat peserta didik, seperti kerajinan, pertanian, teknologi, dan layanan jasa, guna mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja.

c. Kurikulum Asrama (*Boarding*)

Kurikulum ini merupakan bagian dari pendidikan karakter, yang menekankan penguatan nilai-nilai kepemimpinan, spiritualitas, nasionalisme, penguasaan bahasa, dan keterampilan komunikasi. Guru untuk pendidikan karakter disediakan sepenuhnya oleh Kementerian Agama, memastikan bahwa nilai-nilai keagamaan dan moral diajarkan secara komprehensif.

Penyatuan pendidikan formal dengan pendidikan karakter dan vokasi mencerminkan sebuah model pendidikan holistik. Ini adalah sebuah "miniatur pengentasan kemiskinan terpadu" yang mengakui bahwa hambatan pendidikan bagi anak miskin tidak hanya terbatas pada biaya sekolah, tetapi juga mencakup faktor lain, seperti kesehatan dan gizi. Dengan mengatasi faktor-faktor ini secara simultan, program ini berupaya menciptakan ekosistem pendukung yang utuh untuk menjamin keberhasilan siswa.

2.7 Implementasi Program Sekolah Rakyat

Program Sekolah Rakyat diselenggarakan sebagai respons terhadap masalah struktural kemiskinan dan angka putus sekolah yang tinggi, terutama di daerah dengan akses pendidikan terbatas. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 yang menunjukkan angka putus sekolah yang signifikan menjadi pemicu utama bagi visi pemerintah untuk menciptakan akses pendidikan yang setara guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mencapai target Indonesia Emas 2045 (menpan.go.id, 2025). Landasan hukum tunggal yang mengatur program ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Dokumen ini secara eksplisit diberi judul "Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem". Penempatan program Sekolah Rakyat di dalam kerangka kerja ini secara tegas menempatkannya sebagai salah satu instrumen strategis pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Inpres juga mengamanatkan penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) untuk menentukan sasaran program, yang menegaskan bahwa program ini dirancang sebagai bagian dari strategi makro yang terintegrasi dan berbasis data.

2.7.1 Aktor dan Peran dalam Implementasi Program Sekolah Rakyat

Implementasi Program Sekolah Rakyat melibatkan banyak kementerian/lembaga sehingga membentuk struktur koordinasi yang cukup kompleks. Meskipun desainnya menekankan sinergi lintas sektor, keterlibatan aktor yang beragam ini juga berpotensi menciptakan birokrasi gemuk dan tumpang tindih kewenangan.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 Implementasi Program Sekolah Rakyat menunjukkan arsitektur kelembagaan yang terkoordinasi secara lintas sektoral dan dapat dianalisis melalui tiga lapisan koordinasi: koordinator makro, pelaksana utama, dan pelaksana teknis.

1. Koordinator Makro

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bertugas mengoordinasikan kementerian/lembaga terkait. Namun, koordinasi ini sangat bergantung pada efektivitas sinkronisasi di tingkat operasional, yang dalam praktik sering menghadapi hambatan karena perbedaan mandat masing-masing lembaga.

2. Pelaksana Utama (Kementerian Sosial)

Kementerian Sosial memegang mandat penyelenggaraan Sekolah Rakyat berbasis asrama. Peran ini cukup besar mengingat Kemensos bukan lembaga pendidikan formal, sehingga diperlukan koordinasi erat dengan Kemendikdasmen dan Kemenag. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dualisme standar pendidikan jika tidak dikelola dengan baik.

3. Aktor Pendukung dan Teknis

Keberhasilan implementasi program memerlukan dukungan koordinatif dari berbagai kementerian/lembaga lain:

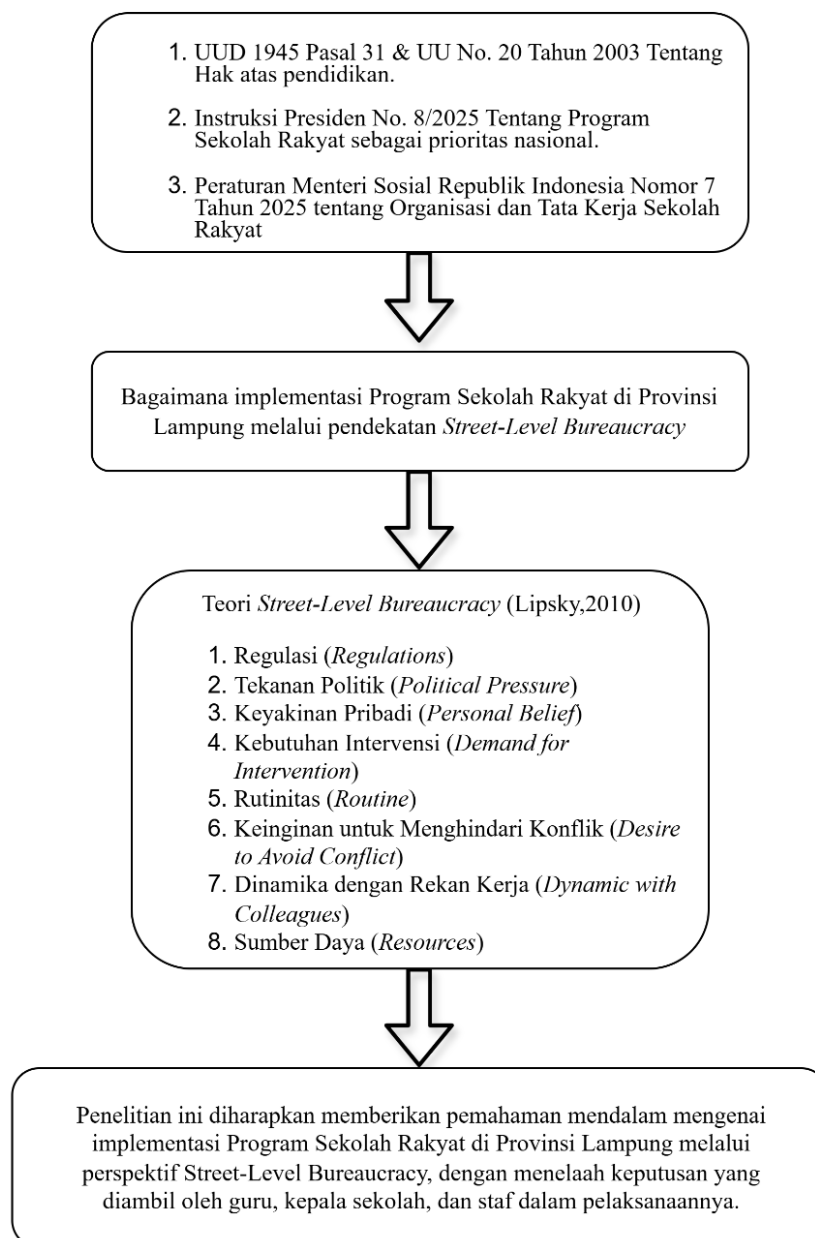
- a. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama (Kemenag) berperan dalam penyediaan guru dan tenaga pendidik, serta penyusunan kurikulum masing-masing. Kemendikdasmen bertanggung jawab atas kurikulum sekolah formal, sedangkan Kemenag menyiapkan kurikulum pendidikan agama sebagai basis pembentukan karakter siswa. Namun, adanya dua lembaga pendidikan formal memerlukan harmonisasi standar yang tidak selalu mudah.
- b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung penyediaan sarana dan prasarana strategis untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar dan kehidupan berasrama. Namun, proses pembangunan berpotensi menunda pelaksanaan jika tidak selaras dengan jadwal pendidikan.

- c. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan alokasi anggaran dan mengatur sinergi pendanaan sesuai kemampuan fiskal negara.
- d. Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berperan dalam kebijakan dan rekrutmen sumber daya manusia. MenPAN-RB menetapkan formasi jabatan dan struktur kelembagaan, sedangkan BKN mengelola proses teknis rekrutmen guru dan tenaga pendidik.
- e. TNI dan Polri terlibat sebagai pendukung lapangan. TNI membantu penyiapan sarana prasarana dan SDM, sedangkan Polri bertugas menjaga keamanan. Namun, keterlibatan institusi pertahanan dan keamanan dalam program pendidikan perlu diawasi agar tidak meluas menjadi pengaruh berlebihan dalam pengelolaan sekolah.

Struktur koordinasi yang luas ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk membangun kerja sama lintas sektor, tetapi juga menuntut kapasitas koordinasi yang kuat agar program tidak terjebak dalam birokrasi yang gemuk dan kurang responsif.

2.8 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian, kerangka berpikir memiliki peran penting sebagai panduan dalam seluruh proses, mulai dari perumusan masalah hingga analisis data. Kerangka ini memberikan landasan teoritis dengan mengaitkan teori-teori yang relevan serta menjelaskan hubungan antarvariabel yang diteliti. Menurut Uma Sekaran dalam (Sugiyono, 2023), kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menggambarkan keterkaitan antara teori dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai permasalahan utama. Kerangka berpikir yang baik akan memaparkan secara teoritis hubungan antarvariabel penelitian. Berikut kerangka berpikir dalam penelitian ini.



Gambar 2. Kerangka Berpikir
Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Kerangka berpikir di atas menggambarkan hubungan antara permasalahan kemiskinan dan tingginya angka putus sekolah di Provinsi Lampung dengan lahirnya Program Sekolah Rakyat sebagai kebijakan afirmatif pemerintah. Meskipun telah diatur melalui regulasi dan didukung anggaran yang besar, implementasi program di lapangan masih menghadapi kendala berupa

keterlambatan renovasi asrama, ketidaksiapan sarana-prasarana, dan koordinasi antar-lembaga yang belum optimal. Untuk menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif *Street-Level Bureaucracy* (Lipsky, 2010) yang menekankan peran diskresi guru, kepala sekolah, dan staf sebagai aktor kunci dalam menjembatani kebijakan pusat dengan kondisi riil di lapangan. Melalui pendekatan ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas Program Sekolah Rakyat di masa mendatang.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Dukeshire dan Thurlow (2010, hlm.2) dalam Sugiyono (2023), penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan data dan menyajikan informasi yang diperoleh. Sejalan dengan itu, Creswell (2014, hlm.2) menjelaskan bahwa metode penelitian mencakup serangkaian prosedur yang meliputi pengumpulan data, analisis, serta interpretasi hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, metode penelitian dapat dipahami sebagai suatu langkah yang terstruktur dalam memperoleh data secara ilmiah, mengolahnya, dan memberikan penafsiran untuk menjawab permasalahan penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian kualitatif berorientasi pada penggalian makna dan pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena, dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan serta perilaku yang diamati di lapangan. Sejalan dengan itu, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), (Kartono & Kartini, 1996) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke SRMA 32 Lampung Selatan guna memperoleh data yang relevan terkait implementasi Program Sekolah Rakyat, termasuk dinamika pengambilan keputusan, diskresi, dan strategi adaptasi para *street-level bureaucrats* dalam menjalankan program tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian studi kasus memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam suatu fenomena tertentu yang terjadi dalam konteks nyata, baik menyangkut individu, kelompok, organisasi, maupun suatu peristiwa. Dengan pendekatan Studi Kasus, penelitian berfokus pada bagaimana kebijakan Program Sekolah Rakyat dijalankan di tingkat sekolah, termasuk latar belakang, mekanisme implementasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Selain mendeskripsikan fenomena yang terjadi, studi kasus ini juga menganalisis peran dan tindakan guru, kepala sekolah, dan aktor terkait lainnya sebagai *street-level bureaucrats* dalam menafsirkan, menyesuaikan, dan menerapkan kebijakan di lapangan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi Program Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung dengan mengambil SRMA 32 Lampung Selatan sebagai lokasi studi yang mewakili pelaksanaan program di daerah. Analisis dilakukan menggunakan perspektif *Street-Level Bureaucracy*, dengan menelaah bagaimana pelaksana kebijakan di tingkat lapangan yaitu kepala sekolah, guru, dan wali asrama melakukan diskresi, adaptasi, serta pengambilan keputusan dalam menjalankan Program Sekolah Rakyat.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SRMA 32 Lampung Selatan yang berlokasi di Jl. Sebiay, Hajimena, Kec. Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35145, Provinsi Lampung. Lokasi ini dipilih sebagai studi kasus (*case study*), yaitu pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk melakukan investigasi mendalam terhadap satu fenomena tunggal, dalam hal ini implementasi Program Sekolah Rakyat, dalam konteks kehidupan nyata yang terbatas.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah yang menempati peringkat rendah dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi dan menghadapi tantangan signifikan terkait angka putus sekolah. Oleh karena itu, Program Sekolah Rakyat sebagai intervensi kebijakan di lokasi ini menjadi kasus yang sangat relevan dan strategis untuk dikaji.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data mencakup seluruh informasi yang diperoleh dari informan maupun dari dokumen, baik berupa data statistik maupun bentuk lainnya, yang relevan untuk keperluan penelitian (Subgyo, 2006)

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak subjek yang diteliti sebagai data utama penelitian (Riyanto, 2004). Dalam penelitian ini, data primer berupa hasil wawancara mendalam dan observasi partisipatif yang dilakukan kepada para informan, yaitu Kepala Sekolah Program Sekolah Rakyat (SRMA 32 Lampung Selatan), guru, staf pengajar, wali asrama, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Data ini berfungsi sebagai inti penelitian, memberikan pandangan langsung dan otentik dari para aktor yang berinteraksi langsung dengan kebijakan dan target sarannya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia atau dikumpulkan oleh pihak lain yang dapat mendukung dan melengkapi data primer. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Dokumen tersebut mencakup Instruksi Presiden, pedoman teknis Program Sekolah Rakyat, laporan internal terkait alokasi anggaran, dan data statistik dari instansi pemerintah seperti BPS, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Sosial.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan krusial dalam penelitian, karena bertujuan memperoleh data yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut Sugiyono (2023), pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, dari sumber yang berbeda, dan dengan beragam teknik, baik observasi, wawancara, dokumentasi, maupun gabungan dari ketiganya (*triangulasi*).

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab antara peneliti dan informan. Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2023) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui pertanyaan serta jawaban, sehingga terbentuk pemahaman bersama mengenai suatu topik. Sugiyono (2023) menegaskan bahwa wawancara digunakan untuk menggali informasi secara lebih mendalam, baik pada tahap pendahuluan untuk menemukan masalah maupun pada tahap pengumpulan data utama.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan umum sesuai fokus penelitian. Pedoman tersebut hanya berfungsi sebagai panduan agar proses wawancara tetap terarah namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara terbuka.

Penelitian ini menggunakan teknik sampling non-probabilitas: *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau posisi strategis yang memungkinkan peneliti memperoleh data yang paling sesuai dan mendalam tentang fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2023 hal 289). Teknik ini sangat tepat untuk penelitian kualitatif karena mengedepankan kualitas dan kedalaman informasi, bukan kuantitas.

Dalam penelitian ini, kriteria utama yang digunakan adalah keterlibatan langsung individu sebagai birokrat tingkat jalanan dalam implementasi Program Sekolah Rakyat. Berdasarkan kriteria tersebut, informan dibagi menjadi dua kategori:

- a. Informan Kunci (*Key Informant*): Informan kunci adalah individu yang memiliki pengetahuan menyeluruh dan otoritas tinggi terkait permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, yang berperan sebagai informan kunci adalah Kepala Sekolah Program Sekolah Rakyat (SRMA 32 Lampung Selatan) Sebagai penanggung jawab operasional, kepala sekolah memiliki pemahaman menyeluruh mengenai pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di tingkat satuan pendidikan.
- b. Informan Pendukung (*Supporting Informant*): Informan pendukung adalah individu yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program dan memberikan informasi rinci dari sudut pandang mereka di lapangan. Keterangan dari mereka akan melengkapi informasi dari informan kunci. Informan pendukung dalam penelitian ini meliputi:
 1. Guru & Wali Asrama: Sebagai birokrat lini depan yang memiliki diskresi langsung dalam menentukan pemberian manfaat (nilai/pembelajaran) atau sanksi kepada siswa.
 2. Wali Asuh: Aktor kunci yang berinteraksi paling intim dengan klien (siswa), sehingga menjadi sumber data utama terkait strategi coping dalam kehidupan asrama.
 3. Informan Triangulasi

Untuk meminimalkan bias dari pernyataan pelaksana kebijakan, penelitian ini juga melibatkan informan triangulasi dari pihak penerima manfaat. Informan ini tidak menjadi fokus utama penelitian, melainkan berfungsi sebagai sumber pembandingan untuk memvalidasi temuan lapangan.

Dalam hal ini, siswa tidak hanya berperan sebagai alat validasi, tetapi juga sebagai subjek penilai yang membantu mengidentifikasi tingkat keberhasilan diskresi yang dilakukan oleh birokrat lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai apakah adaptasi aturan yang dilakukan oleh guru benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik atau justru menimbulkan ketidakpastian norma.

Penggunaan informan triangulasi dilakukan secara terbatas dan proporsional, sehingga tetap menjaga konsistensi penelitian dengan perspektif *Street-Level Bureaucracy*.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Nasution (1988) dalam Sugiyono (2023) menyatakan bahwa observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan, karena data mengenai realitas hanya dapat diperoleh melalui pengamatan. Marshall (1995) dalam Sugiyono (2023) menambahkan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku serta makna yang terkandung di balik perilaku tersebut.

Peneliti akan melakukan observasi langsung di SRMA 32 Lampung Selatan untuk mengamati kondisi fisik sarana dan prasarana (misalnya, asrama, ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan), interaksi antara guru, staf, dan siswa, serta rutinitas harian di sekolah. Observasi ini akan menjadi instrumen penting untuk memverifikasi atau mengontradiksi informasi yang diperoleh melalui wawancara. Misalnya, temuan observasi mengenai kondisi laboratorium yang belum dilengkapi dapat memvalidasi pernyataan informan tentang keterbatasan sumber daya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya. Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa dokumen tertulis dapat berupa peraturan, kebijakan, arsip administrasi, atau catatan resmi. Bogdan dalam Sugiyono (2023) menyebutkan bahwa dalam tradisi penelitian kualitatif, dokumen personal mencakup narasi individu yang menggambarkan pengalaman, tindakan, dan keyakinan seseorang. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan pendidikan terkait Program Sekolah Rakyat, laporan resmi pemerintah, arsip administrasi sekolah, serta pemberitaan media yang relevan dengan proses seleksi, implementasi, dan dinamika pelaksanaan program.

Tabel 11. Dokumentasi Penelitian

No	Nama Dokumen	Tujuan
1	Permensos No. 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat	Menjadi dasar hukum utama mengenai struktur kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat.
2	SOP/ Pedoman Operasional Seleksi Siswa Sekolah Rakyat	Menjadi acuan formal untuk menilai kesenjangan prosedur dengan praktik seleksi di SRMA 32 Lampung Selatan.
3	Data jumlah guru, wali asrama, dan rasio pendampingan	Menunjukkan keterbatasan SDM yang memengaruhi implementasi kebijakan.
4	Struktur organisasi SRMA 32 Lampung Selatan	Menggambarkan posisi dan peran pelaksana kebijakan (kepala sekolah, guru, wali asrama).
5	Dokumentasi sarana prasarana (foto lab, perpustakaan, dapur/kantin, gedung)	Mendukung temuan pra-riset tentang keterbatasan sarpras dan kendala pelaksanaan KBM Mendukung temuan pra-riset tentang keterbatasan sarpras dan kendala pelaksanaan KBM

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif karena bertujuan mengorganisasi data agar dapat ditafsirkan dan menghasilkan temuan yang bermakna. Menurut Sugiyono (2023), Analisis data merupakan proses sistematis untuk menelaah, menyusun, dan menginterpretasi data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini mencakup pengorganisasian data ke dalam kategori, pemisahan ke dalam unit-unit, sintesis informasi, serta perumusan pola yang memungkinkan penarikan kesimpulan secara jelas dan dapat dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dilakukan sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai. Artinya, peneliti telah mulai melakukan analisis selama wawancara berlangsung, misalnya dengan menafsirkan jawaban informan dan menindaklanjutinya dengan pertanyaan tambahan jika dirasa belum memadai. Dengan cara ini, data yang diperoleh dapat diuji kredibilitasnya sejak awal proses penelitian.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga data mencapai kondisi jenuh. Aktivitas utama dalam analisis data meliputi tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah berdasarkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi akan diorganisasikan ke dalam kategori-kategori tematik yang muncul dari lapangan serta dikaitkan dengan konsep-konsep *Street-Level Bureaucracy* pada tahap analisis.

Dalam tahap reduksi data, peneliti melakukan kategorisasi tematik berdasarkan delapan variabel teori *Street-Level Bureaucracy* (Lipsky, 2010). Setiap narasi informan dianalisis untuk mengidentifikasi pola diskresi dan strategi koping, yang kemudian dikontraskan dengan dokumen regulasi (Inpres dan Permensos) guna melihat derajat kesenjangan implementasi (*implementation gap*).

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks. Penyajian ini akan memudahkan peneliti untuk memahami hubungan antar-variabel dan menarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan dari data yang telah disajikan. Kesimpulan akan diverifikasi dengan cara meninjau kembali data lapangan dan membandingkannya dengan kerangka teoretis untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut valid dan didukung oleh bukti empiris.

Model interaktif ini sangat sesuai untuk penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis data secara berkelanjutan dan paralel dengan proses pengumpulan data, bukan hanya di akhir penelitian. Hal ini menciptakan proses penelitian yang dinamis dan adaptif.

3.7 Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa penelitian ini bersifat ilmiah sekaligus untuk mengevaluasi kebenaran data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, penilaian keabsahan mencakup empat aspek utama meliputi *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2023).

1. *Credibility*

Uji *credibility* atau uji kepercayaan dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, *credibility* dijaga melalui perpanjangan pengamatan di lokasi penelitian, peningkatan ketelitian selama wawancara dan observasi, serta triangulasi sumber data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah, guru, wali asrama, dan pendamping PKH mengenai pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Selain itu, data hasil wawancara akan diverifikasi dengan hasil observasi langsung dan dokumen resmi (pedoman teknis, laporan program), sehingga diperoleh gambaran yang utuh.

2. *Transferability*

Transferability berkaitan dengan sejauh mana temuan penelitian ini dapat diterapkan pada konteks lain. Peneliti memastikan transferabilitas dengan mendeskripsikan secara rinci karakteristik lokasi penelitian, profil SRMA 32 Lampung Selatan, jumlah siswa dan staf, serta kondisi sosial-ekonomi lingkungan sekitar. Dengan demikian, pembaca dapat menilai apakah hasil penelitian relevan untuk diterapkan pada sekolah atau program serupa di wilayah lain dengan kondisi yang sebanding.

3. *Dependability*

Uji *dependability* dilakukan untuk memastikan konsistensi data, yaitu sejauh mana penelitian akan menghasilkan temuan yang sama jika diulang dengan prosedur yang serupa. Untuk itu, peneliti akan mendokumentasikan seluruh tahapan penelitian, mulai dari perumusan masalah, pemilihan informan, proses wawancara dan observasi, hingga analisis data. Dokumentasi ini dapat diaudit oleh pembimbing atau pihak lain yang kompeten untuk menilai keajegan prosedur penelitian.

4. *Confirmability*

Confirmability bertujuan menguji objektivitas hasil penelitian. Data yang diperoleh harus benar-benar merepresentasikan pengalaman dan perspektif para pelaksana Program Sekolah Rakyat, bukan bias atau interpretasi sepihak peneliti. Untuk memastikan hal ini, peneliti akan menyajikan kutipan langsung dari hasil wawancara, menampilkan temuan yang diverifikasi melalui observasi, serta melakukan member checking dengan mengonfirmasi hasil sementara kepada informan untuk memastikan kesesuaian interpretasi.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Sekolah Rakyat di SRMA 32 Lampung Selatan menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak semata ditentukan oleh desain program dan kelengkapan regulasi, melainkan sangat bergantung pada diskresi birokrat tingkat lapangan (street-level bureaucrats), khususnya kepala sekolah, guru, dan wali asrama. Mereka tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang secara aktif menafsirkan, menyesuaikan, dan menentukan bentuk implementasi kebijakan dalam praktik sehari-hari..

Diskresi tersebut muncul sebagai respons terhadap tiga faktor utama. Pertama, ambiguitas dan keterbatasan regulasi, di mana aturan formal tidak selalu mampu menjawab kompleksitas kondisi siswa dan situasi lapangan, sehingga pelaksana perlu melakukan penyesuaian agar program tetap berjalan. Kedua, tekanan politik untuk mencapai hasil secara cepat, yang mendorong pelaksana untuk memastikan keberhasilan program dalam waktu singkat, meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan kondisi siswa yang beragam. Ketiga, keyakinan personal pelaksana, khususnya nilai kemanusiaan yang dianut oleh guru dan pengelola sekolah, yang memengaruhi cara mereka mengambil keputusan dan menentukan pendekatan dalam pembinaan siswa.

Di sisi lain, penelitian ini menyimpulkan bahwa karakteristik lingkungan asrama SRMA 32 Lampung Selatan secara sosiologis beroperasi sebagai *total institution* (institusi total) yang mengontrol ruang, waktu, dan seluruh aktivitas siswa prasejahtera secara ketat selama 24 jam. Kondisi institusi total yang kaku ini pada fase awal seringkali memicu beban psikologis, kejenuhan, hingga tindakan indisipliner (*underlife*) pada diri siswa. Dalam dinamika tersebut, ruang diskresi yang dimiliki oleh birokrat tingkat lapangan bertindak sebagai katup penyelamat (*safety valve*) yang krusial. Melalui pelonggaran aturan yang fleksibel (seperti penyesuaian jadwal kunjungan orang tua dan izin penggunaan gawai di hari Minggu), para pelaksana berhasil melunakkan kekakuan institusi total tersebut tanpa harus kehilangan esensi dari tujuan pembentukan disiplin kebijakan.

Dengan demikian, implementasi Program Sekolah Rakyat di SRMA 32 tidak berlangsung secara mekanis sesuai dengan kebijakan tertulis, tetapi merupakan hasil interaksi antara aturan formal, lingkungan asrama yang berciri institusi total, dan praktik diskresi di tingkat lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks kebijakan pendidikan afirmatif, peran birokrat tingkat lapangan menjadi faktor kunci yang menentukan arah dan efektivitas implementasi kebijakan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran strategis yang diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat:

1. Implikasi Teoretis

- a. Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan indikator operasional yang lebih spesifik untuk mengukur aspek-aspek *Street-Level Bureaucracy* dalam konteks sekolah berasrama, misalnya ukuran diskresi adaptif, kualitas pembinaan psikososial, dan konsistensi penerapan SOP antar unit.

- b. Kajian lebih lanjut perlu mengaitkan teori SLB dengan model implementasi hibrida (*top-down/bottom-up*) untuk menjelaskan bagaimana regulasi pusat dan praktik lokal saling membentuk hasil kebijakan.

2. Implikasi Praktis

- a. Pemerintah Pusat (Kemensos / Pengelola Program):
 1. Perkuat validitas data sasaran (DTSEN/DTKS) melalui prosedur verifikasi berkala yang menggabungkan data administratif dan home visit; tetapkan mekanisme pembaruan data yang responsif.
 2. Legalkan dan dukung peran inovatif yang efektif (mis. Wali Asuh) melalui revisi juknis dan alokasi formasi serta insentif.
 3. Alokasikan anggaran khusus bagi layanan psikologis dan perawatan (target minimal 1 psikolog/perawat per SRMA regional) serta untuk pemeliharaan infrastruktur (pagar, CCTV, Wi-Fi).
- b. Pemerintah Daerah / Dinas Terkait:
 1. Percepat dukungan infrastruktur permanen (pagar, asrama permanen) serta fasilitasi rekrutmen tenaga lokal (guru agama, wali asuh, juru masak).
 2. Sediakan mekanisme pemeliharaan teknis cepat melalui kontrak lokal agar fasilitas berfungsi optimal.
- c. Pengelola SRMA (Kepala Sekolah dan Tim Operasional):
 1. Institusionalisasikan praktik efektif melalui SOP internal (Wali Asuh, mekanisme penyesuaian kunjungan wali, protokol pembinaan) agar tidak bergantung pada inisiatif individu.
 2. Perbaiki dokumentasi kasus disiplin dan mekanisme koordinasi lintas unit (rapat rutin, sistem rujukan) untuk mengurangi inkonsistensi.
 3. Prioritaskan pembinaan psikososial: jadwalkan konseling reguler, latih wali asuh dalam keterampilan dasar pendampingan, dan manfaatkan pendamping PKH untuk komunikasi dengan keluarga.

4. Kelola beban kerja staf dengan rotasi, kompensasi lembur, dan program kesejahteraan agar ketergantungan pada komitmen personal tidak berujung pada burnout.
- d. Monitoring & Evaluasi (M&E):
1. Kembangkan dashboard M&E sederhana yang memuat indikator inti: kehadiran, retensi, capaian akademik dasar, rasio wali asuh, ketersediaan psikolog/perawat, status infrastruktur, dan jumlah home visit terverifikasi; gunakan laporan triwulanan untuk perbaikan operasional.

3. Saran Penelitian Selanjutnya

- a. Lakukan studi komparatif multi-lokasi (beberapa SR di provinsi berbeda) untuk menguji generalisasi praktik baik dan variasi implementasi.
- b. Kaji dampak jangka panjang (longitudinal) terhadap lulusan Sekolah Rakyat akses pendidikan tinggi, transisi kerja, dan mobilitas sosial.
- c. Teliti efektivitas intervensi psikososial dan pelatihan Wali Asuh melalui metode kuantitatif dan eksperimental bila memungkinkan.
- d. Analisis *cost-effectiveness* untuk menentukan alokasi sumber daya yang paling efisien (mis. biaya psikolog vs. *outcome* kesehatan mental siswa).

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat untuk interpretasi temuan dan sebagai masukan untuk penelitian lanjutan:

1. Keterbatasan cakupan kasus (studi kasus tunggal). Penelitian difokuskan pada SRMA 32 Lampung Selatan sebagai studi kasus. Meskipun memberikan gambaran mendalam, temuan bersifat kontekstual sehingga kehati-hatian diperlukan jika hendak menggeneralisasi ke seluruh Sekolah Rakyat di daerah lain.
2. Tahap awal pelaksanaan program. Penelitian dilakukan pada fase awal operasional SRMA 32; dinamika pelaksanaan, alokasi sumber daya, dan

kebijakan pendukung dapat berubah seiring waktu sehingga temuan merefleksikan kondisi awal implementasi.

3. Keterbatasan eksplorasi perspektif siswa. Penelitian ini memposisikan siswa hanya sebagai informan triangulasi untuk memvalidasi tindakan aparatur pelaksana (*street-level bureaucrats*). Berdasarkan teori Michael Lipsky, hal ini menjadi keterbatasan karena respons harian dan dinamika hubungan timbal balik dari sudut pandang siswa selaku klien belum dikaji secara mendalam.
4. Keterbatasan akses data sekolah akibat kebijakan pusat. Selama proses penelitian, peneliti menghadapi kendala memperoleh beberapa data administratif internal sekolah (mis. dokumen seleksi lengkap, beberapa laporan teknis, atau data personal) karena arahan atau kebijakan dari kementerian yang menyatakan pembatasan pemberian data tersebut kepada pihak luar. Pembatasan ini mengakibatkan beberapa informasi harus diverifikasi melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi yang tersedia secara publik, sehingga ada kemungkinan beberapa aspek kuantitatif atau rincian administratif kurang lengkap. Peneliti mencatat bahwa larangan pemberian data oleh otoritas pusat merupakan faktor eksternal yang membatasi akses empiris, dan hal ini mempengaruhi kemampuan peneliti untuk melakukan analisis kuantitatif yang lebih mendalam terhadap beberapa indikator operasional.
5. Keterbatasan metodologis. Dominasi pendekatan kualitatif (wawancara, observasi, dokumen) memberikan kedalaman pemahaman, namun penelitian ini kurang didukung data kuantitatif longitudinal yang dapat memperkuat generalisasi dan pengukuran efek intervensi secara numerik.

Atas keterbatasan-keterbatasan tersebut, temuan tetap relevan sebagai cerminan praktik implementasi Program Sekolah Rakyat di level sekolah berasrama pada tahap awal, namun direkomendasikan agar penelitian selanjutnya mengatasi kendala akses data dengan dialog lebih lanjut bersama otoritas terkait atau melalui mekanisme kerja sama resmi guna mendapatkan data administratif yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, Y. (2024). Implementasi Sistem Zonasi Pada Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB): Studi Kasus SMAN 2 Pekanbaru. *Edusiana: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 105–118.
- Al Ayubi, G. G., & Sri Arfiah, S. H. (2018). *Implementasi Perda No. 3/2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Projo Kab. Semarang* [Doctoral dissertation]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Alsharefeen, R. (2025). Faculty as *Street-level bureaucrats*: Discretionary Decision-Making in the Era of Generative AI. *Frontiers in Education*, 10, 1662657.
- Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural. *Foundasia*, 13(1), 1–15.
- Apriyanti, H. (2022). *IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 08 PONTIANAK UTARA* [(Doctoral dissertation)]. Universitas Tanjungpura.
- Arifa, F. N. (2025). *Sekolah Rakyat untuk pemerataan pendidikan berkualitas*. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-3-I-P3DI-Februari-2025-1957.pdf
- Barus, L. B. (2022). The *Street-Level Bureaucracy* Implementation in Public Service in Villages in Indonesia. *Journal Of Public Administration and Policy Issues*, 1(2), 31–36.
- Cooper, M. J. F., Sornalingam, S., & O'Donnell, C. (2015). *Street-Level Bureaucracy: an underused theoretical model for general practice?* *The British Journal of General Practice*, 65(636), 376.
- CNN Indonesia. (2025). *Apa itu Sekolah Rakyat yang digagas Prabowo*.
- Delarista, S., Puspaningtyas, A., & Wahyudi, E. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARIWISATA GUA BATU CERMIN DI LABUAN BAJO KABUPATEN MANGGARAI BARAT. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 5(03), 189–201.

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. (2025). *Komitmen pengembangan Sekolah Rakyat*. https://disdikbud.lampungprov.go.id/detail-post/tinjau-srma-32-lampung-selatan-menko-ahy-dan-wagub-jihan-komitmen-majukan-sekolah-rakyat-untuk-pendidikan-berkualitas?utm_source=chatgpt.com
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2025, August 12). *Siaran Pers: Sekolah Rakyat Buka Pintu Pendidikan Unggul untuk Keluarga Miskin di Lampung*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-lampungbengkulu/baca-berita/39166/Siaran-Pers-Sekolah-Rakyat-Buka-Pintu-Pendidikan-Unggul-untuk-Keluarga-Miskin-di-Lampung.html>
- diskominfotik.lampungprov.go.id. (2025, July 22). *Mengenal Program Sekolah Rakyat*. Diskominfotik.Lampungprov.Go.Id. <https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/mengenal-program-sekolah-rakyat>
- Edri-Peer, O., & Cohen, N. (2025). Revisiting *coping mechanisms* on the street-level: a systematic literature review. *Journal of Public Administration Research and Theory*, muaf022. <https://doi.org/10.1093/jopart/muaf022>
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Pantheon Books.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Gilson, L. L. (2015). *Michael Lipsky, Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the individual in public service*.
- Goffman, E. (1961). *Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates*. Anchor Books.
- Guruberdaya. (2025, March 11). *Apa Itu Sekolah Rakyat?* Guruberdaya. <https://guruberdaya.org/apa-itu-sekolah-rakyat/>
- Indonesia.go.id. (2025, July 16). *Sekolah Rakyat jadi harapan baru untuk anak miskin, ini syarat dan cara daftarnya*. Indonesia.Go.Id. <https://indonesia.go.id/kategori/pendidikan/9702/sekolah-rakyat-jadi-harapan-baru-untuk-anak-miskin-ini-syarat-dan-cara-daftarnya?lang=1>
- Kartono, & Kartini. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Mandar Maju.
- Kawer, O. F. S., Baiquni, M., Keban, Y. T., & Subarsono, A. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DENGAN PENDEKATAN HIBRIDA DI KABUPATEN SUPIORI PROVINSI PAPUA. *Sosiohumaniora*, 20(3), 245. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i3.18489>
- kemendikdasmen.go.id. (2025, December 10). *Sekolah Rakyat Menengah Atas 32 Lampung Selatan — Data Kemendikdasmen*.

- Kemendikdasmen.Go.Id.
<https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/pendidikan/npsn/70055446>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Sekolah Rakyat: Gebrakan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo*.
- Kementerian PANRB. (2025). *Sekolah Rakyat, terobosan Presiden Prabowo putus mata rantai kemiskinan*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). *Model Pembangunan Sekolah Rakyat*. Jakarta: Kemensos RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). *Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Rakyat*.
- Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia. (2025). *Kunjungan ke SRMA 32 Lampung Selatan*.
https://kemenkoinfra.go.id/detailpost/kunjungi-sekolah-rakyat-di-lampung-selatan-menko-ahy-pastikan-kesiapan-infrastruktur-dukung-pendidikan-berkualitas?utm_source=chatgpt.com
- Lipsky, M. (2010a). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Service*. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*, 76, 1–275. <https://doi.org/10.2307/1960475>
- Lipsky, M. (2010b). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the individual in public service*. Russell sage foundation.
- Madani, M., Iva, M. I. N., & Amiruddin, I. (2021). Peran street level bureaucracy dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Makassar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(3), 333–343.
- Maharani Devi, S., & Ismail, H. (2024). ANALISIS PELAKSANAAN PENGENTASAN KELUARGA MISKIN DALAM PERSPEKTIF STREET LEVEL BIROKRASI (Studi Pengetasan Keluarga Miskin di Kelurahan Wonorejo Tegalsari). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(01).
<https://surabayakota.bps.go.id/>
- Marly, R., & Atika. (2025, August 19). *Mutu Pendidikan Tingkat SMA/SMK di Provinsi Lampung masih menghadapitantangan besar*. Lampost.Co.
<https://lampost.co/humaniora/mutu-pendidikan-tingkat-sma-smk-di-lampung-masih-menghadapi-tantangan-besar/>
- menpan.go.id. (2025, August 11). *Sekolah Rakyat, Program Pemutus Rantai Kemiskinan*. Menpan.Go.Id. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/sekolah-rakyat-program-pemutus-rantai-kemiskinan>

- Munthe, A. (2025, July 15). *Sekolah Rakyat di Lampung Baru Dimulai Akhir Juli*. Liputan6.Com. <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/disdikbud-lampung-pastikan-kesiapan-tenaga-pendidik-sekolah-rakyat-00-5h6fh-5cv3wc>
- OLIVEIRA, B. R. D. E., & PEIXOTO, M. D. O. C. D. E. L. (2021). *Street-Level Bureaucracy and public policies: analyzing educational policy implementation from the perspective of schools and teachers*. *Educação Em Revista*, 37, e219212.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/316745/inpres-no-8-tahun-2025?utm_source=chatgpt.com
- Permensos RI Nomor 7 Tahun 2025, Pub. L. No. 7 Tahun 2025, Kementerian Sosial Republik Indonesia (2025).
- Pojoksatu. (2025). *Sekolah Rakyat Prabowo: Janji pendidikan berkeadilan untuk anak miskin*.
- Presiden Republik Indonesia. (2025). *Target pengembangan Sekolah Rakyat*.
- Ramdani, A. R. (2025, July 7). *Anak jalanan dan putus sekolah jadi target Sekolah Rakyat, pembelajaran dilakukan lewat individual approach*. Merahputih.Com. <https://www.merahputih.com/post/read/anak-jalanan-dan-putus-sekolah-jadi-target-sekolah-rakyat-pembelajaran-dilakukan-lewat-individual-approach>
- Riyanto, A. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit.
- Sanga, L. D., & Wangdra, Y. (2023). Pendidikan adalah faktor penentu daya saing bangsa. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 84–90.
- Savitri, D. (2025, July 14). *Kurikulum Sekolah Rakyat didesain khusus dengan tambahan pendidikan karakter*. Detik.Com. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8010889/kurikulum-sekolah-rakyat-didesain-khusus-dengan-tambahan-pendidikan-karakter>
- Sabatier, P. A. (1986). Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: a Critical Analysis and Suggested Synthesis. *Journal of Public Policy*, 6(1), 21–48.
- Setkab.go.id. (2025, September 11). *Presiden Prabowo Targetkan 500 Sekolah Rakyat untuk Perluas Akses Pendidikan*. Setkab.Go.Id. <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-targetkan-500-sekolah-rakyat-untuk-perluas-akses-pendidikan/>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025). *Optimalkan upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem*. https://setneg.go.id/baca/index/optimalikan_upaya_pengentasan_kemiskinan_dan_penghapusan_kemiskinan_ekstrem_pemerintah_terbitkan_inpres_8_2025?utm_source=chatgpt.com

- Sobirin, S. S. (2023). *Implementasi Kebijakan (Studi Kasus, Teori dan Aplikasinya)*. CHAKTI PUSTAKA INDONESIA.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R. S., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar kebijakan publik*. Humanities Genius.
- Subagyo, J. (2006). *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Rineka cipta.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Taufik, Y., & Sriharyati, S. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran. *ATRABIS Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 6(2), 203–211.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The policy implementation process: A conceptual framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.